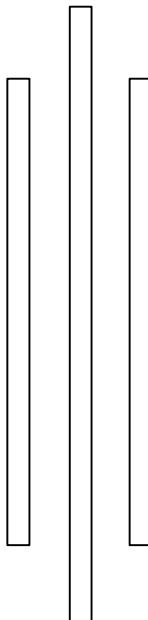




RISALAH RAPAT PARIPURNA
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024-2025
DPRD KABUPATEN SITUBONDO
TANGGAL 22 MEI 2025
ACARA
PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN (PEMBICARAAN TINGKAT I) TENTANG
RAPERDA RPJMD KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 – 2029



Ditebitkan Oleh :
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025

**Jl. Kenanga No.1 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo
Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur**

www.dprd.situbondokab.go.id

DAFTAR ISI

Jadwal Rapat Paripurna	2
Risalah Rapat Paripurna	3
- Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I) tentang	
Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 – 2029	8
Berkas Pendukung	67
Daftar Hadir	73
Foto Kegiatan	87

JADWAL RAPAT PARIPURNA
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2024-2025
DPRD KABUPATEN SITUBONDO
TANGGAL 22 MEI 2025

NO	HARI/ TANGGAL	ACARA
1	Senin / 22 Mei 2025 Pukul 09.00 WIB	Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I) tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 - 2029 Susunan Acara I : <ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan;2. Pembacaan Surat Masuk;3. Penyampaian Nota Pengantar Oleh Kepala Daerah;4. Penutup.
2	Senin / 22 Mei 2025 Pukul 10.00 WIB	Susunan Acara II : <ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan;2. Penyampaian Pemandangan umum Fraksi;3. Penutup.
3	Senin / 22 Mei 2025 Pukul 11.00 WIB	Susunan Acara III : <ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan;2. Penyampaian Tanggapan / Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi;3. Penutup.

RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Mei 2025

Pukul : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Lantai II Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo

I. JENIS : Rapat Paripurna

II. SIFAT : Umum dan Internal

III. ACARA RAPAT : - **Penyampaian Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024**

- **Susunan Acara I :**

1. Pembukaan;

2. Penutup.

- **Susunan Acara II :**

1. Pembukaan;

2. Penutup.

- **Susunan Acara III :**

1. Pembukaan;

2. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT : Nama : **MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.**

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Situbondo

V. SEKRETARIS RAPAT : Nama : **Drs. NUGROHO, M.Si**

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Situbondo

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Partai Kebangkitan Bangsa : 13 orang

2. Partai Persatuan Pembangunan : 9 orang

3. Partai Gerindra	:	6 orang
4. Partai PDI-Perjuangan	:	5 orang
5. Partai Golongan Karya	:	5 orang
6. Partai Demokrat	:	3 orang
7. Partai Nasdem	:	2 orang
8. Partai Keadilan Sejahtera	:	1 orang
9. Partai Hanura	:	<u>1 orang</u>
Jumlah	:	45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Partai Kebangkitan bangsa	:	10 orang
2. Fraksi Persatuan Pembangunan	:	7 orang
3. Fraksi Gerakan Indonesia Maju	:	5 orang
4. Fraksi PDI-Perjuangan	:	4 orang
5. Fraksi Golongan Karya	:	5 orang
6. Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera	:	<u>3 orang</u>
Jumlah	:	34 orang

➤ FRAKSI PKB

NO	NAMA	JABATAN
1	MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.	Anggota PKB
2	MOKHAMMAD BADRI, S.T.	Ketua Fraksi
3	SITI MARIAH ULFA, S.H.	Wakil Ketua Fraksi
4	FIQI KRISTIA VINALOSA, A.Md.Keb.	Bendahara Fraksi
5	ZULFIKAR PURNAMA RAHMAN, S.T.	Anggota Fraksi
6	FADLAILUL WAFIR, S.Pd.	Anggota Fraksi
7	SUPRAPTO	Anggota Fraksi

8	YAZID HASYIM	Anggota Fraksi
9	MUZAMMIL DAMAN HURI, S.H.	Anggota Fraksi
10	AHMAD JUNAIDI	Anggota Fraksi

➤ **FRAKSI PPP**

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Abd. RAHMAN, S.H., M.H	Anggota Fraksi
2	MUHAMMAD HASAN ILLYIN, S.Psi.	Sekretaris Fraksi
3	IRMA NOERVADILA, S.Pd, M.Pd.	Bendahara
4	Dr. Drs. H. SOFWAN HADI, M.Si	Anggota Fraksi
5	H. FAISOL / ABD. SYAKUR JALIL	Anggota Fraksi
6	NURIL HASHINA, S.H.	Anggota Fraksi
7	Dra. Hj. UMI MASLAHAH	Anggota Fraksi

➤ **FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)**

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. H. HAMBALI, M.Pd.	Anggota Fraksi
2	ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.	Ketua Fraksi
3	AFIF REZA RIMUNDA, S.H.	Bendahara
4	ZAIDANI	Anggota Fraksi
5	ROZAN FATIH FIGURRAHMAN HAFID	Anggota Fraksi

➤ **Partai PDI P**

NO	NAMA	JABATAN
1	ANDI HANDOKO, S.M.	Sekretaris Fraksi
2	RUDI AFIANTO, S.Pd, M.Pd.	Ketua Fraksi

3	NINGSIH MS, S.Pdi, M.Pd.	Wakil Ketua Fraksi
4	SUPOYO, S.H.	Anggota Fraksi

➤ **Partai GOLKAR**

NO	NAMA	JABATAN
1	RACHMAD, SH, M.Hum.	Ketua Fraksi
2	HEROE SOEGIHARTONO, S.H.	Sekretaris Fraksi
3	SISWO PRANOTO, S.H.	Bendahara
4	Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.	Anggota Fraksi
5	TUMYANI	Anggota Fraksi

➤ **Partai DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA**

NO	NAMA	JABATAN
1	JANUR SASRA ANANDA, S.E.	Ketua Fraksi
2	AHMAD MUHLISIN, S.P..M.M.	Bendahara
3	YOGI PRATAMA, S.Sos.	Anggota Fraksi

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR :

1. Fraksi Kebangkitan Bangsa : 3 orang
2. Fraksi Persatuan Pembangunan : 2 orang
3. Fraksi Gerakan Indonesia Maju : 3 orang
4. Fraksi PDI-Perjuangan : 1 orang
5. Fraksi Golongan Karya : - orang
6. Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera : 2 orang

Jumlah : **11 orang**

Yaitu :

➤ **FRAKSI PKB**

NO	NAMA	JABATAN
1	JOHANTONO, S.Pd	Sekretaris Fraksi
2	EDY WAHYUDI, S.E.	Anggota Fraksi
3	M. ASYHERI NUR, S.Sy.	Anggota Fraksi

➤ **FRAKSI PPP**

NO	NAMA	JABATAN
1	ARIFIN, S.H.I., M.H.	Ketua Fraksi
2	M. FAISOL, S.Pd.I., M.Pd.I.	Anggota Fraksi

➤ **FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)**

NO	NAMA	JABATAN
1	HARI BUDI PRASETYA, A.Md.	Sekretaris Fraksi
2	DJAENUR RIDOH	Anggota Fraksi
3	SAMSI IKA SARI, S.Pd.	Anggota Fraksi

➤ **Partai PDI P**

NO	NAMA	JABATAN
1	RISKIYAH NURFADILA, S.Sos.	Anggota Fraksi

➤ **Partai GOLKAR**

NO	NAMA	JABATAN
-	-	-

➤ **Partai DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA**

NO	NAMA	JABATAN
1	H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI	Sekretaris Fraksi

2	TOTON BENI MARTONO, S.Kep.	Anggota Fraksi
---	----------------------------	----------------

VIII. TURUT HADIR :

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Situbondo
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Situbondo

IX. JALANNYA RAPAT :

----- **PROTOKOL** -----

Mohon ijin bapak ibu

Mengawali acara dengan rasa nasionalisme kepada tanah air Indonesia.

hadirin dimohon berdiri.

Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya

>>>>> **LAGU INDONESIA RAYA** <<<<<<<<

Hadirin disilahkan duduk kembali.

Bapak ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kami serahkan spenuhnya kepada Pimpinan Rapat.

Kepada yang terhormat Bapak Mahbub Junaidi, S.H.I. kami persilahkan.

----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)** -----

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLHI WABAROKATU.

Yth. Sdr. Wakil Bupati Situbondo Ibu Ulfiyah, S.Pd.I.

Yth. Segenap Para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo.

Yth. Segenap Para Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Situbondo hadir saat ini

Kapolres Situbondo atau yang mewakili, Komandan Kodim 0823 Situbondo atau yang mewakili.

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

Yth. Para Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Para Pimpinan Perangkat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Yth. Sdr. Camat se Kabupaten Situbondo, Direktur RSUD, Pimpinan BUMD, serta rekan-rekan Media yang kami hormati.

Mengawali acara ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanallahu Wata'la, karena hanya atas rahmat dan Maunah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo dengan agenda Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I) tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029.

Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam.

Bapak Ibu dan hadirin Yang Kami Hormati.

Marilah kita mengawali seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan pembacaan Sholawat Nariyah,.....

'Ala hadihinniyah wa'ala kulli niyyatin sholihah, alfatihah...

Terima kasih

Selanjutnya kami atas nama Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian serta kesediaan Saudara-Saudari untuk menghadiri undangan kami pada acara Rapat Paripurna ini.

Sebelum acara ini dimulai, saya mohon dengan hormat kepada seluruh peserta rapat untuk dapatnya menjaga ketertiban sehingga seluruh kegiatan Rapat Paripurna ini dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar serta memperoleh hasil sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Menurut catatan daftar hadir Saudara Sekretaris DPRD bahwa dari 45 orang Anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir adalah sejumlah 30 orang, dan dengan mengucapkan:

=====: **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM** =====

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo pada hari ini Kamis tanggal 22 Mei 2025 dengan agenda Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I) tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029.

kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 KALI

Adapun susunan acara Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pembacaan Surat Masuk oleh Sekretaris DPRD;
3. Penyampaian Penjelasan oleh Bupati;
4. Penutup.

Itulah susunan acara Rapat Paripurna pada hari ini, selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua yaitu Pembacaan Surat Masuk,

Kepada Saudara Sekretaris DPRD, disilahkan

=====

PEMBACAAN SURAT MASUK

=====

----- Sekretaris DPRD (Drs. NUGROHO, M.Si) -----



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan PB. Sudirman No. 01 , Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 671161, Faksimile (0338) 671885
Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-el situbondosetda@gmail.com

Situbondo, 19 Mei 2025

Nomor : 100.3.2/3076/431.013/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 46 (empat puluh enam) berkas
Perihal : **Penyampaian Naskah Akademik dan Raperda**

Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Situbondo

di-

SITUBONDO

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, 1 (satu) berkas Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 beserta rancangan akhir sebagaimana terlampir.

Selanjutnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, mohon untuk dapatnya dibahas dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----**

Terimakasih kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan surat masuk.

Acara berikutnya yakni penjelasan atas Raperda tentang RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 yang akan disampaikan oleh Saudara Wakil Bupati Situbondo, kepada yang terhormat Ibu Ulfiyah S.Pd.I dipersilahkan.

===== **PENYAMPAIAN PENJELASAN OLEH BUPATI** =====

----- **Wakil Bupati Situbondo (ULFIYAH, S.Pd.I) -----**

Penyampaian Penjelasan oleh Bupati Situbondo terkait Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I) tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029.

----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----**

Disampaikan terimakasih kepada Saudara Wakil Bupati Situbondo Mbak Ulfi yang telah menyampaikan Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029.

Rapat Dewan Dan Hadirin Yang Kami Hormati,

Demikian telah kita ikuti bersama Rapat Paripurna dengan agenda yang pertama pada hari ini.

Tak lupa atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPRD mengucapkan terima kasih atas perhatian dan perhatian dan kehadirannya.

=====

PENUTUP

=====

Dan dengan mengucapkan.

“ alhamdulillah hirabbil ‘alamin ”

Rapat paripurna hari ini dengan agenda pertama yakni atas penyampaian Raperda kami dinyatakan di tutup.

KETOK 3 KALI

WALLAHU MUAFIQILA AQWAMITHORIQ

WASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABARAKATUH

-----**PARIPURNA SESI II**-----

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLHI WABAROKATU.

Bismillah wal hamdulillah

Yth. Sdr. Wakil Bupati Situbondo

Yth. Segenap Para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo.

Yth. Segenap Jajaran Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Situbondo.

Yth. Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

Yth. Para Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Para Pimpinan Perangkat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Yth. Sdr. Camat se Kabupaten Situbondo, Direktur Rumah Sakit, Pimpinan

BUMD, serta rekan-rekan Media yang kami hormati.

Puji syukur kepada Allah Subhanallahu Wata'ala atas segenap limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti Rapat Paripurna yang kedua ini dalam rangka Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi.

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Selanjutnya kami atas nama Pimpinan DPRD tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Saudara-Saudara sekalian, dan kami mohon kepada seluruh peserta rapat untuk menjaga ketertiban sehingga seluruh rapat paripurna ini dapat berlangsung dengan aman tertib dan lancar serta memperoleh hasil sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Menurut catatan daftar hadir dari saudara Sekretaris DPRD, bahwa dari 45 orang Anggota Dewan yang telah menandatangani daftar hadir adalah sejumlah 30 orang, maka sesuai ketentuan, Quorum telah terpenuhi, dan dengan mengucapkan :

=====: **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM** =====

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo pada hari ini Kamis tanggal 22 Mei 2025 dalam rangka Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I) tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 KALI

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Sebelum kita memasuki acara pokok, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa susunan acara pada Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi;
3. Penutup.

Demikian susunan acara Rapat Paripurna pada hari ini, selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua yaitu Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

Untuk itu kami silahkan.

Untuk fraksi-fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya disilahkan untuk mendaftarkan diri.

**>>> Interaksi Pimpinan Rapat Dengan Anggota Untuk Mengajukan
Fraksinya Mendaftar Urutan Pembacaan Pendapat Fraksi <<<**

Fraksi Pertama : Golkar

Fraksi Kedua : PPP

Fraksi Ketiga : PDIP

Fraksi Keempat : GIM

Fraksi Kelima : DNS

Fraksi Keenam : PKB

Baiklah terima kasih.

Untuk kesempatan pertama pemandangan umum akan disampaikan oleh Fraksi Golongan Karya, dipersilahkan.

=====
PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
=====

----- **Anggota DPRD (H. RACHMAD, S.H.,M.Hum.) -----**



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

**TERHADAP
RAPERDA RPJMD KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2029**

**DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
22 MEI 2025**



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Jl. Kenanga No. 01 Telp/ Fax. (0338) 675613 Situbondo 68312



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

**TERHADAP
RAPERDA RPJMD KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2029**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo

Saudara Anggota Forkopimda Kabupaten Situbondo

Saudara Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor,

Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Kabupaten Situbondo

Saudara Direktur BUMD di Situbondo

Insan Pers dan hadirin sekalian yang berbahagia

Pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat *Allah Subhanallah wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan kasih-sayang, kenikmatan dan Rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiat dan dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo, dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi Terhadap *Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029*.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Uswah Hasanah kita, Nabi Agung Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat yang selalu setia mengikutinya dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin allahumma amin.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami Hormati,

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode lima tahun terhitung sejak dilantik sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, tentu harus mengacu pada dokumen dan tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang mana hal ini sebagai bagian pijakan untuk mengambil tema-tema pembangunan selanjutnya. Karena RPJMD adalah bagian dari petikan 5 tahun tujuan jangka panjang. Banyak program dan kegiatan yang harus dituntaskan dalam mencapai tujuan tersebut, khususnya yang tertuang pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Pada kesempatan kali ini, ijinkan kami menyampaikan beberapa Pemandangan Umum Fraksi Partai Golongan karya kabupaten Situbondo yaitu sebagai berikut:

1. Pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2025-2029 di Konsiderannya belum mencantumkan Inmendagri no 2 tahun 2025, sebagai Dasar Hukum meskipun dalam penyusunan RPJMD ini sebenarnya sudah mengikuti intruksi dimaksud karena Instruksi ini membawa sejumlah

perubahan penting dibanding Permendagri no 86 tahun 2017, antara lain : a. Perbedaan struktur bab dalam dokumen perencanaan, b. Adanya proyeksi sampai dengan tahun 2030, untuk mengakomodasi masa transisi Kepala Daerah dan persiapan penyusunan RKPD 2030. Sehubungan dengan hal tersebut agar Tim Penyusun mencantumkan Inmendagri tersebut baik pada konsideran maupun pada Bab 1, Dasar Hukum Penyusunan sekaligus ulasan di Bab 1 Latar Belakang tersebut mengapa Kepala Daerah terpilih berkewajiban untuk segera Menyusun RPJMD tahun 2025-2029 dan harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan.

2. Pada Bab 1, tentang pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD tahun 2025-2029, secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), agar ditambahkan sebagaimana amanat Inmendagri no 2 tahun 2025 yaitu Pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas, holistic-tematik, integrative and spasial.
3. Berdasarkan Hubungan antar RPJMD Kabupaten Situbondo th 2025 - 2029 dengan RTRW Propinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, disebutkan bahwa kebijakan pengembangan wilayah untuk kebupaten situbondo termasuk dalam Sistem Agropolitan Ijen meliputi Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso dan Jember, terkait dengan hal tersebut Fraksi Golkar menyarankan agar Mas Rio Bupati Situbondo segera mendindak lanjuti dengan membuat MOU dalam Percepatan Pembangunan Kawasan selingkar IJEN.
4. Masih rendahnya pelaku usaha di Kabupaten Situbondo terhadap pembuangan akhir limbah pabrik karena belum memiliki IPAL, atau tidak memfungsikan IPAL dan membuang limbahnya langsung ke

Sungai tanpa diolah lebih dulu, karena itu Fraksi Golkar memberikan saran kepada Bupati agar memerintahkan DLH untuk sesering mungkin melakukan sosialisasi tentang pembuangan limbah, meminta kepada pelaku usaha agar secara rutin melaksanakan uji lab/pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

5. Pada BAB 2 Halaman 130, diuraikan bahwa Sekretariat Daerah memiliki peran yang sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam melaksanakan fungsinya Sekretariat Daerah memiliki beberapa permasalahan pada aspek manajemen yang menyebabkan menurunnya kepercayaan publik dan seterusnya. Dalam melaksanakan pelayanan publik Sekretariat Daerah cenderung lambat dalam merespon permintaan masyarakat dan kurangnya koordinasi antar unit sehingga pelayanan menjadi efektif dan efisien. Menurut fraksi Golkar narasi tersebut harus di hapus, karena tugas pokok Setd bukan memberikan pelayanan publik tapi membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta memberikan pelayanan administratif kepada PD. Sedangkan pelayanan publik dilaksanakan oleh OPD teknis seperti DPMPTSP, DINKES, DISDUKCAPIL, BAPENDA, DLL. Selanjutnya manakala yang ingin di uraikan yaitu alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana komponen pengungkit Pembangunan ZI (Zona Integritas) menuju WBK / WBBM telah dilaksanakan dan memberikan dampak pada pencapaian sasaran hasil, seperti manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan

peningkatan kualitas pelayanan public. Selain indikator pengungkit tersebut, perlu juga diuraikan tentang bagaimana terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

6. Pada kerangka pendanaan untuk PAD kami mengambil contoh pada bidang Pajak Daerah, berapa rata-rata pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2026 sampai 2030. Laju pertumbuhannya apakah termasuk Optimis, Moderat, dan Pesimis? Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah tahun 2020-2024 untuk bidang Pajak Daerah yang mencapai 11,36%. Oleh karena itu, fraksi Golkar menyarankan untuk dilakukan penghitungan ulang proyeksi PAD dari sektor Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Meskipun tidak optimis diharapkan cukup moderat diangka 5-6%.
7. Terkait hal tersebut diatas, pemda agar melakukan penghitungan ulang terhadap proyeksi PAD mengingat :
 - a. Banyaknya potensi dari pendapatan maupun retribusi yang hilang karena ketidakpatuhan terhadap regulasi.
 - b. Potensi piutang pajak PBB P2 yang pada tahun 2024 yang mencapai 50 M.

Kondisi diatas menurut pandangan fraksi Golkar agar dilakukan sentralisasi karcis satu pintu melalui bapenda dan agar pemerintah kabupaten situbondo membentuk Satgas khusus yang memang fokus melakukan penagihan dengan melibatkan Pihak Kejaksan, TNI/POLRI. Jangan seperti yang sudah terjadi telah dibentuk tim khusus tetapi

personilnya hanya sekda, asisten, dan opd terkait, dikhawatirkan kesibukan masing-masing.

8. Terhadap proyeksi kerangka pendanaan tahun 2025 sampai 2029 pada Belanja Operasi untuk Belanja Pegawai mulai tahun 2026 hingga 2030 terus mengalami kenaikan. Fraksi Golkar menyarankan agar dilakukan penghitungan ulang dengan memperhatikan UU nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD (Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) yang mengatur pembatasan proporsi **Belanja Pegawai maksimal 30%** dari total belanja APBD.
9. Pada tabel 4.1 Program Perangkat Daerah tahun 2026-2030 Urusan/Program/Outcome, kami ambil contoh pada pengelolaan Pendidikan, yaitu meningkatnya layanan Pendidikan PAUD/SD/SMP/nonFormal/Kesetaraan Adapun indicator Outcomenya adalah jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (APS) dengan satuan persentase. menurut fraksi Golkar, kalau yang dijadikan indicator outcomenya adalah jumlah anak itu tidak benar karena termasuk indicator output. Seharusnya indicatornya berbunyi persentase jumlah anak.
10. Terhadap program pemberdayaan dan perlindungan koperasi yaitu meningkatnya produktivitas koperasi dengan indicator outcome persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas, pada target 2026 sebesar 10% sama dengan tahun 2025 maupun baseline tahun 2024, mohon dijelaskan apa yang menjadi ukuran meningkatnya koperasi yang berkualitas dan dari berapa jumlah koperasi yang ada dengan jumlah pagu anggaran tersebut kegiatan apa saja dalam meningkatkan

koperasi yang berkualitas? Mengingat peningkatan target pada program tersebut dari tahun 2026-2030 masih kecil.

11. Pada indikator kinerja utama RPJMD tahun 2025 – 2029, untuk indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami kemajuan. Selama tahun 2020-2024 rata-rata IPM Kabupaten Situbondo meningkat sebesar 0,82 Persen pertahun dari 68,94 persen tahun 2020 menjadi 71,22 Persen pada Tahun 2024. Dan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,39 persen poin, dari 11,90 persen pada maret 2023 menjadi 11,53 persen pada maret 2024. Fraksi Partai Golongan Karya meminta penjelasan proyeksi IPM Tahun 2025 – 2029 berapa anggaran setiap tahunnya dan bentuk apa saja bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD pengampu IPM tersebut?
12. Pemerintah Republik Indonesia di bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil Langkah progresif untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan pendekatan berbasis Pendidikan. Salah satu inisiatif kuncinya adalah pengembangan Sekolah Rakyat, sebuah program Pendidikan transformatif yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Oleh karena itu Kami menyampaikan dukungan atas rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Situbondo. Mohon penjelasan bagaimana langkah Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk merealisasikan keberadaan sekolah Rakyat tersebut ?
13. Dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 tentang Permasalahan Pembangunan Daerah yang ada dikabupaten Situbondo sebanyak Tujuh Permasalahan untuk itu Fraksi Partai Golkar mempertanyakan apa yang akan dilakukan dalam mengatasi tujuh permasalahan daerah

tersebut dan berapa anggaranya yang disiapkan yang mampu memberikan daya ungkit terhadap permasalahan tersebut?

14. Dokumen RPJMD Tahun 2025 -2029 tentunya nanti akan banyak kendala kedepan yang akan dihadapi, khususnya menuju angka indikator keberhasilan yang direncanakan. Bagaiman Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo menerapkan analisis resiko yang dihadapi jika capaian yang ditetapkan diprediksi terlalu tinggi atau terlalu rendah ?
15. Terkait dengan sasaran pembangunan Kabupaten Situbondo memandang perlu penambahan sasaran di bidang Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Situbondo yang belum ter expose keluar. Dan masih banyak wisata-wisata yang membutuhkan sentuhan-sentuhan Pemerintah Daerah untuk percepatan Pembangunan di kawasan wisata tersebut, baik dari segi infrastruktur jalan maupun pembangunan pendukung serta promosinya ke luar daerah, hal ini juga berdampak langsung terhadap perkembangan ekonomi masyarakat secara langsung dan PAD bisa meningkat. Mohon tanggapannya ?
16. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029, mempertanyakan kepada Pemerintah Daerah, sejauh mana perhatian dalam melakukan penyerapan tenaga kerja lokal sehingga dapat mengurangi jumlah tingkat pengangguran terbuka yang akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo. Mohon jelaskan ?
17. Di dokumen RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 meminta kepada Pemerintah Daerah hendaknya selalu memperhatikan kondisi rill dan permasalahan yang terjadi sebenarnya dilapangan terhadap

dunia pendidikan. Peningkatan mutu infrastruktur ruang kelas sekolah yang layak, pemerataan peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang memadai, kekurangan tenaga guru, penempatan guru P3K yang masih menimbulkan persoalan menyisihkan guru sertifikasi, banyaknya jabatan kepala sekolah dasar yang belum definitif. Hendaknya menjadi prioritas di RPJMD Tahun 2025-2029. Hal ini penting kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama sehingga nantinya dapat terciptanya pemerataan mutu dan kualitas pendidikan antara kota dan desa. Kesenjangan mutu dan kualitas pendidikan antara di wilayah kota dan desa cukup memprihatinkan. Dimana salah satu indikator capaiannya adalah rata-rata lama sekolah di Kabupaten Situbondo masih berada di kategori rendah dan bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Timur termasuk terendah dan dibawah rata-rata indeks pendidikan Jawa Timur. Tentu hal ini menjadi konsentrasi penting dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan. Apa langkah-langkah dan strategi yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam dokumen RPJMD yang nantinya mengutamakan penyelesaian persoalan tersebut?

18. Menekankan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo terhadap Pendidikan keagamaan. Mohon penjelasan bagaimana komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya fasilitasi bidang pendidikan keagamaan terutama madrasah dan pesantren ?
19. Persoalan utama dalam pembangunan Kabupaten Situbondo adalah angka kemiskinan, gini rasio, dan pemerataan infrastruktur wilayah 17 Kecamatan yang tidak merata serta tidak tepat sasaran. Tentu hal ini

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya terhadap Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029, semoga pertemuan ini menjadi evaluasi menuju kearah yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi setiap langkah kita. Aamiin.....

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Situbondo, 22 Mei 2025

Mengetahui,
KETUA FRAKSI
PARTAI GOLONGAN KARYA

H. RACMAD. SH. M.Hum

SEKRETARIS FRAKSI
PARTAI GOLONGAN KARYA

HEROE SOEGIHARTONO. SH

JURU BICARA
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

----- PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----

Terimakasih kami sampaikan kepada juru bicara sekaligus ketua Fraksi Partai Golkar H. Rachmad, S.H.,M.Hum. dari Daerah Pemilihan Situbondo VII.

Selanjutnya kesempatan kedua kami persilahkan kepada juru bicara Fraksi

PPP, disilahkan.

----- **Anggota DPRD (MUHAMMAD HASAN ILLYIN, S.Psi.) -----**



=====
**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBODO**

Jl. Kenanga No. 1 Telip, FAX. (0385) 675613 Situbondo (68312)

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
TERHADAP
RANCANGAN AKHIR DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo

Yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati Situbondo

Yang Saya hormati Seluruh anggota DPRD

Yang saya hormat Sekretaris Daerah, Para Asisten, Para staf ahli, Para Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo

Yang saya hormati segenap Anggota FORKOPIMDA,

Rekan-rekan wartawan dan hadirin yang saya hormati

Segala Puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita serta shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan bimbingannya dan keteladannya yang akhlakul karimah menjadikan kita mempunyai derajat di sisinya sehingga kita dapat berkumpul dalam rapat paripurna Persetujuan dan Pembahasan **RANCANGAN AKHIR DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.**

Saudara Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas penyusunan Rancangan Akhir dan Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029, sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi arah pembangunan lima tahunan daerah

Setelah mencermati dokumen Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD yang diserahkan kepada DPRD beberapa waktu lalu, kami, Fraksi partai Persatuan Pembangunan ingin menyampaikan hal-hal berikut :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menekankan pentingnya sinkronisasi RPJMD dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJMN, Renstra OPD, dan hasil Musrenbang. Harmonisasi ini sangat penting agar arah pembangunan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
2. Terkait dana cadangan pemerintah daerah,
 - a. mengingat dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan strategis yang membutuhkan dana besar dan tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran seperti PILKADA, apakah pemerintah daerah kabupaten situbondo sudah merencanakan untuk penganggaran dana cadangan kabupaten situbondo dan dimasukkan dalam dokumen RPJMD ini sebagai dasar penganggaran dana cadangan?
 - b. Sebagai catatan apabila memang sudah mempersiapkan dana cadangan untuk diperhatikan dalam pembentukan dana cadangan bisa mempengaruhi fleksibilitas APBD terutama jika fiscal daerah terbatas seperti di kabupaten situbondo yang sudah beberapa kali mengalami deficit anggaran dan mengingat kapasitas fiscal daerah semakin rendah akibat tidak berkembangnya PAD dan penurunan transfer pemerintah pusat
3. Terkait Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID). Dalam dokumen RPJMD pada Bab I angka 1.3.8 ada kajian tentang hubungan antara RPJMD Kabupaten Situbondo dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) dan Penyusunan RPJMD harus juga sesuai

dengan dokumen RIPJPID. Sesuai Pasal 27 dan Pasal 28 PerBRIN Nomor 5 Tahun 2023 RIPJPID ditetapkan dengan Perkada. Sedangkan pada JDIH Kabupaten Situbondo kemarin kami belum menemukan Perkada tentang RIPJPID ini, Mengapa dokumen ini juga belum di tetapkan sebagai perkada? Padahal dokumen ini adalah salah satu rujukan penyusunan RPJMD.

4. Terkait panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap, yang harus disesuaikan dengan SK Gub Nomor 188/207/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Fungsinya, lantas data apa yang digunakan sebagai dasar pencantuman data jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Situbondo yang muncul baik dalam dokumen RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Situbondo? Karena selama ini data yang muncul di dokumen RPJMD adalah data dari dinas PUPP, bagaimana dengan dokumen RPJPD yang sudah ditetapkan dengan menggunakan data yang juga berasal dari DPUPP?
5. Pada bab 1 ketentuan umum, mohon ditambahkan pengertian RDTR (rencana detail tata ruang). Hal ini penting karena RDTR merupakan rencana terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yg dilengkapi dgn peraturan zonasi dan sekaligus sebagai dasar penyusunan rencana teknis sektor dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Mohon dijelaskan mengapa program prioritas administrasi desa dimasukkan pada misi 2 yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif, penguatan usaha mikro, perluasan lapangan kerja dan meningkatkan ketahanan pangan daerah, seharusnya program prioritas tersebut masuk pada misi ke 4 yakni mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang bersih, kolaboratif dan inovatif.
7. Mohon dijelaskan pada tabel 4.1 program perioritas daerah tahun 2026-2030 bidang pengelolaan tanah kosong tentang penentuan persentasi target dari tahun 2026 s/d 2030.
8. Mohon dijelaskan, mengapa penyediaan RDTR (rencana detail tata ruang) pada masing-masing kecamatan sekabupaten tidak diprogramkan sebagai prioritas program perangkat daerah dari tahun 2025-2029. Pada hal kita tahu bahwa RDTR adalah penjabaran dari RTRW dan berfungsi

sangat urgen utk mendukung kemudahan berinvestasi dan pencegahan korupsi serta utk pengendalian pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah kabupaten situbondo harus lebih serius utk segera menyusun peraturan bupati tentang RDTR dimasing-masing kecamatan sekabupaten situbondo.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati.

Fraksi PPP menegaskan bahwa RPJMD bukan hanya sekedar kewajiban administrative, melainkan bentuk akuntabilitas politik dan moral kepada masyarakat. Dan kami akan mendalami lebih lanjut baik itu dalam pembahasan bersama Pansus yg telah dibentuk.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mudah – mudahan menjadi kontribusi konstruktif dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan membawa kebaikan dan kemajuan bagi Situbondo kota tercinta kita ini.

*Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamit Thariiq dan
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Situbondo, 22 Mei 2025

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD. KABUPATEN SITUBONDO**

Ketua,

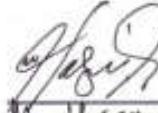
Sekretaris,


ARIFIN, S.H.I., M.H




MUHAMMAD HASAN ILLYIN, S.Psi

Dibacakan Oleh,


M. HASAN ILLYIN

----- PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----

Terimakasih kami sampaikan kepada Saudara Muhammad Hasan Illyin anggota Fraksi PPP dari Daerah Pemilihan Situbondo VII.

Selanjutnya kesempatan ketiga kami persilahkan kepada juru bicara Fraksi PDIP, disilahkan.



**PEMANDANGAN UMUM
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DALAM RANGKA
PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN
RAPERDA TENTANG RPJMD KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025 - 2029**

Yth. Pimpinan Rapat dan Pimpinan DPRD kab. Situbondo

Yth Bupati dan Wakil Bupati Situbondo

Yth. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Situbondo :

- Kapolres Situbondo
- Komandan Kodim 0823
- Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo
- Kepala Pengadilan Negeri Situbondo

Yth. Sdr. Pimpinan Instansi Fertikal Kab. Situbondo

Yth. Sekda kab. Situbondo, Sekretaris. DPRD kab. Situbondo, para Asisten, Staf Ahli, kepala Dinas, kepala Badan, kepala Kantor, kepala Bagian dan Camat se- kab. Situbondo

Yth. Sdr. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kab. Situbondo

Yth. Rekan-rekan Anggota DPRD Kab. Situbondo

Yth. Rekan-rekan Pers dan Undangan sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Merdeka!

Bismillahirrahmanirrohim...

Alhamdulillahi Robbil 'Alamin, segala Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas ridlaNYAlah pada sa'at ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo dalam keadaan Sehat wal 'Afiat, Lahir dan Batin serta masih di beri kekuatan nikmat Iman dan islam Sehingga dapat memenuhi panggilan tugas dan tanggung jawab kita dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 – 2029.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas keharibaan Sang Revolusioner Padang Pasir yakni Nabi Besar Rosulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan pada Siang ini. semoga kita semua selalu mendapat syafaatnya hingga yaumil kiamah, Amiin Ya Rabbal Aalamiin.

Hadirin Rapat Paripurna DPRD Yang Terhormat

Kami Fraksi PDI Perjuangan yang pertama menyampaikan apresiasi atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025–2029, sebagai pedoman strategis pembangunan lima tahun ke depan.

Kami memandang bahwa RPJMD ini bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi merupakan kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat Situbondo, yang harus berpihak pada kepentingan wong cilik, memperkuat kemandirian daerah, dan menjawab tantangan zaman dengan semangat gotong royong dan keadilan sosial.

Dalam Pemandangan umum ini kami akan menyampaikan sebagai bentuk tanggung jawab politik dan komitmen Fraksi PDI Perjuangan dalam mengawal arah pembangunan daerah yang berkeadilan, dan berpihak pada rakyat. Kami percaya, Situbondo membutuhkan RPJMD yang bukan hanya ambisius di atas kertas, tetapi juga realistik, terukur, dan membumi serta menyentuh terhadap kebutuhan riil masyarakat dari desa sampai ke kota.

Hadirin sekalian yang terhormat.....

Sebelum kami sampaikan Pemandangan Umum Fraksi kami sedikit mengutip kata bijak Bung Karno yang menyampaikan bahwa "**Tujuan kita ialah bukan hanya merdeka, tetapi merdeka 100 persen!**"

Ungkapan ini menekankan bahwa Kemerdekaan yang sejati adalah ketika rakyat tidak hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari kemiskinan, ketertinggalan, dan kebodohan. RPJMD 2025 – 2029 ini harus menuntun Situbondo menuju kemerdekaan yang utuh, melalui pemerataan pembangunan, penghapusan kesenjangan, dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Sehingga mewujudkan Situbondo naik Kelas akan betul – Betul dirasakan oleh Masyarakat.

Hadirin sekalian yang terhormat.....

Setelah melalui pembahasan dan kajian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Kabupaten Situbondo akan menyampaikan beberapa hal antara lain sebagai berikut :

1. Dalam masa 5 tahun kedepan keberadaan MPP menjadi sangat dibutuhkan. MPP harus bisa menjadi solusi atas Ruetnya Birokrasi terutama masalah Perizinan dan pelayanan dasar Publik. Apa strategi konkret Pemkab untuk meningkatkan kualitas SDM pelayanan di MPP,

termasuk etika pelayanan, teknologi informasi, dan penanganan pengaduan masyarakat..? karena dari banyaknya keluhan masyarakat ini akan menjadikan peralihan fungsi MPP yang awalnya dijadikan pusat pelayanan Namun berubah menjadi pusat keluhan Masyarakat. Karena sampai saat ini sinergitas antar OPD yang seharusnya menyatu di MPP belum berjalan dengan maksimal.

2. Dalam rangka mewujudkan Situbondo Naik kelas dalam hal pendanaan sudah saatnya kita mengandalkan PAD dan tidak tergantung dari dana Alokasi dari Pusat. Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemerintah kabupaten Situbondo bisa memproyeksikan Berapa besaran PAD kita yang Realistik sesuai dengan potensi yang ada.?? Jangan seperti tahun – tahun anggaran sebelumnya, Pencantuman angka di sumber pendapatan daerah khususnya PAD hanya sekedar otak atik angka dengan target tidak realistik, sekedar menunjukkan seolah – olah APBD Sehat. Namun pada realisasinya penuh dengan koreksi, koreksi, koreksi dan tidak realistik.
3. Dalam rangka penataan Dunia Pendidikan kedepan Pemkab Khususnya Dinas Pendidikan perlu melakukan inventarisir Tenaga pendidik yang ada di setiap satuan Pendidikan dengan menyesuaikan jumlah kelas yang ada. Mengingat sampai hari ini penataan tenaga pendidik belum menunjukkan pemerataan yang sesuai dengan jumlah kelas yang ada. Apa solusi kongkrit yang akan dilakukan dalam mengatasi fenonima yang di anggap biasa ini sehingga mengakibatkan banyak tenaga pendidik merasa kecewa dengan adanya kebijakan seperti 600 orang yang terpaksa harus dirumahkan.??
4. Angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo dalam data BPS tahun 2024 mencapai 11,5%. Berapakah target mengenai dengan penurunan angka kemiskinan dalam 5 tahun kedepan yang ada di Kabupaten Situbondo.??
5. Dalam rangka meningkatkan pembangunan yang berkualitas 5 tahun kedepan mengingat Situbondo merupakan salah satu Daerah yang masuk dalam kategori Rawan Bencana. Ini perlu menjadi perhatian khusus

Pemerintah daerah, Adakah peta rawan bencana terbaru dan rinci yang digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan fisik lima tahun ke depan?

6. Dalam rangka Menarik Investor mau berinvestasi di Kabupaten Situbondo Pemkab perlu menyiapkan langkah – langkah khusus yang harus dipersiapkan seperti tidak mempersulit perizinan dan lain sebagainya. Langkah cerdas apa yang sudah disiapkan dan apakah sudah ada target investasi yang akan di sasar untuk pembangunan situbondo kedepan.??

Demikianlah Pemandangan umum Fraksi kami terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029, semoga ada guna dan manfaatnya.

Ter-iring Do'a, Permohonan Ma'af dan terima kasih.

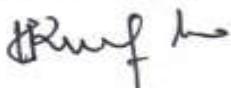
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Merdeka.....

Situbondo, 22 Mei 2025

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (FPDIP)
DPRD KABUPATEN SITUBONDO**

KETUA FRAKSI



RUDI AFIANTO, S.Pd M.Pd

SEKRETARIS



ANDI HANDOKO, SM

JURU BICARA



RISKIYAH NURFADILA, S.Sos

----- PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----

Terimakasih kepada Saudara Riskiyah Nurfadila anggota Fraksi PDIP dari Daerah Pemilihan Situbondo II yang telah menyampaikan pemandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya kesempatan ketiga kami persilahkan kepada juru bicara Fraksi GIM, disilahkan.

----- Anggota DPRD (AFIF REZA RIMUNDA, S.H.) -----



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI GIM
KABUPATEN SITUBONDO
Sekretariat: Jalan Kenanga No 1 68311
SITUBONDO – JAWA TIMUR



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
DALAM
PEMBAHASAN DAN PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH RPJMD KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN 2025 - 2029

Bismillahirrahmanirrahim,

Salam Indonesia Maju Untuk Kita Semua

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo.

Yth. Pimpinan rapat paripurna DPRD Kabupaten Situbondo

Yth. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Yth. Sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli, kepala dinas, kepala badan serta seluruh pejabat dilingkungan pemerintahan kabupaten situbondo

Yth. Segenap anggota FORKOPIMDA atau yang mewakili dan Rekan-rekan wartawan dan hadirin yang kami hormati

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Hormati

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Gerakan Indonesia Maju pada rapat paripurna hari ini, kami ucapkan puji syukur ALHAMDULILLAH kita panjatkan kehadirat Allah SWT dimana pada hari ini kita sekalian diberi kekuatan, kesehatan, nikmat iman dan nikmat islam sehingga kita sekalian bisa secara bersama-sama dapat mengikuti rapat

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti, semoga kita semua mendapat Syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti, AMIN....AMIN...YAA...ROBBAL ALAMIN.

Rapat Sidang Paripurna Yang Berbahaqia

Kami Fraksi GIM tidak banyak berpendapat tentang rancangan akhir dari RPJMD ini. Yang tentunya dari rancangan - rancangan awal sebelumnya, kami meyakini telah banyak dilakukan perbaikan - perbaikan narasi dan tujuan yg sudah disepakati dengan para pembahas yakni pansus di tahapan awal. Penekanan kembali yang ingin kami sampaikan adalah bahwasanya rumusan - rumusan RPJMD ini harus seiring seirama dengan RPJPN,RPJPD provinsi. Yang saat ini Presiden kita benar - benar berharap pembangunan di daerah bertumpu kepada kepentingan rakyat dan kebangkitan ekonomi kerakyatan. Fraksi GIM juga mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah agar ada perhatian yang serius terkait sarana dan prasarana di dunia pendidikan, khususnya bagi sekolah yang membutuhkan renovasi dan pembangunan kelas baru, sebab dunia pendidikan adalah salah satu penunjang SDM di Kabupaten Situbondo. Pemerintah daerah juga harus segera mendefinitifkan kepala sekolah di kabupaten situbondo, karena kepala sekolah adalah pemimpin formal di sekolah yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh aspek sekolah termasuk pendidikan.

Untuk OPD hendaknya jangan membuat program - program untuk dinasnya sendiri, tetapi harus berkolaborasi yang baik dengan OPD lainnya, sehingga visi misi yang ingin dicapai akan benar - benar berjalan sesuai dengan harapan. Dalam kesempatan pembahasan di tahapan akhir ini, hirarki disusunnya dokumen RPJMD ini harus sesempurna mungkin dan kami meyakini bahwa pemerintahan ke depan akan berjalan lebih baik dari tahun - tahun sebelumnya.

Sidang Paripurna Yang Terhormat,

Kami benar - benar berterima kasih, kepada tim penyusun dalam hal ini teman - teman eksekutif dan teman - teman pansus RPJMD Kabupaten Situbondo selaku para pembahas, semoga dalam proses perjalanannya diberikan kelancaran, cermat dalam menyusun dan membahas dokumen tersebut, sehingga nantinya benar - benar dijadikan sebuah pijakan kita dalam membangun dan mewujudkan Situbondo naik kelas, seperti yang sudah tercermin dalam visi misi pemerintahan saat ini.

Demikian pemandangan umum Fraksi Gerakan Indonesia Maju dalam rangka Pembahasan dan Persetujuan tentang Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 – 2029. terima kasih, apabila terdapat hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Situbondo, 22 Mei 2025

FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU
DPRD KABUPATEN SITUBONDO

Ketua



ANDRIAN OKTADIANSYAH, S.E.

Sekretaris



HARI BUDI PRASETYA

JURU BICARA FRAKSI GIM



AFIF REZA R.
(.....)

----- PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----

Terimakasih kepada Saudara Afif Reza Rimunda anggota Fraksi GIM dari Daerah Pemilihan Situbondo II.

Kesempatan berikutnya kami persilahkan kepada juru bincang Fraksi DNS, disilahkan.

----- Anggota DPRD (YOGI PRATAMA, S.Sos.) -----



PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA (DNS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TERHADAP PERSETUJUAN RAPERDA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025–2029

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan.

Yang kami hormati,

Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Situbondo,

Bupati dan Wakil Bupati Situbondo beserta seluruh jajaran,

Sekretaris Daerah dan Jajaran Forkopimda

Serta seluruh hadirin yang kami banggakan.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat mengikuti rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Fraksi terhadap **Persetujuan Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025–2029**.

Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera (DNS) menyampaikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah Daerah bersama Panitia Khusus (Pansus) dan seluruh perangkat yang terlibat dalam proses pembahasan Raperda ini. Proses yang telah dilalui mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan arah pembangunan Kabupaten Situbondo lima tahun ke depan lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung kepada kesejahteraan rakyat.

Setelah mencermati hasil pembahasan yang disusun secara menyeluruh, Fraksi DNS menyatakan **setuju terhadap Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah**, dengan beberapa catatan dan saran penting sebagai berikut:

1. Perlu Penajaman Prioritas Pembangunan Daerah

RPJMD sudah merumuskan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan secara umum. Namun Fraksi DNS memandang perlu dilakukan penajaman terhadap program prioritas agar anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara lebih fokus dan efektif.

Kami menyarankan agar Pemerintah Daerah menyusun **peta jalan (roadmap)** prioritas sektoral setiap tahun, yang mampu menjawab persoalan-persoalan strategis di

masyarakat seperti pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antar wilayah.

2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif

Pembangunan yang baik hanya bisa berjalan bila didukung oleh birokrasi yang bersih, responsif, dan profesional. Fraksi DNS mendorong Pemerintah Daerah untuk memperkuat reformasi birokrasi berbasis kinerja dan akuntabilitas.

Kami juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat sipil dan kelompok rentan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan agar tercipta pemerintahan yang benar-benar **inklusif** dan **partisipatif**.

3. Penguatan Sektor Unggulan Lokal: Pertanian, UMKM, dan Pariwisata

Fraksi DNS menilai bahwa RPJMD masih perlu mengoptimalkan potensi unggulan lokal yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata berbasis desa.

Kami mendorong adanya program inovatif berbasis digitalisasi pertanian, pendampingan UMKM secara berkelanjutan, serta strategi promosi pariwisata yang tidak berhenti di slogan, tetapi menyentuh infrastruktur dasar dan SDM pelaku wisata.

4. Afirmasi terhadap Pemuda dan Perempuan

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pemuda dan perempuan harus diberikan ruang nyata dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Fraksi DNS

mengusulkan adanya program afirmatif seperti inkubator pemuda kreatif, pelatihan keterampilan kerja, serta pemberdayaan ekonomi perempuan di level desa hingga kabupaten.

5. Penguatan Sistem Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Fraksi DNS menegaskan bahwa dokumen RPJMD bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal dari kerja pembangunan selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, sistem pengendalian dan evaluasi berkala perlu diperkuat.

Kami mendorong agar Pemerintah Daerah membuka ruang pelaporan capaian RPJMD secara transparan, dapat diakses publik, dan menjadi dasar evaluasi program dan anggaran setiap tahun.

Akhirnya, dengan mengucapkan **Bismillahirrahmanirrahim**, Fraksi Demokrat Nurani Sejahtera menyetujui **Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang definitif**, dengan harapan bahwa seluruh muatan perencanaan yang telah disusun benar-benar dijalankan secara konsisten, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA DPRD SITUBONDO

Ketua Fraksi DNS



JANUR SASRA ANANDA SE

Sekretaris Fraksi DNS



H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI

JURU BICARA FRAKSI DNS



YOGI PRATAMA

----- PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----

Terimakasih kepada Saudara Yogi Pratama Anggota Fraksi DNS dari Daerah Pemilihan Situbondo IV.

Kesempatan berikutnya kami persilahkan kepada juru bicara Fraksi PKB, disilahkan.

----- **Anggota DPRD (YAZID HASYIM) -----**

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

**TERHADAP
RANCANGAN AKHIR DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat Pimpinan Sidang dan Segenap Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo

Yang terhormat saudara Wakil Bupati Kabupaten Situbondo

Yang Saya hormati Seluruh anggota DPRD Kabupaten Situbondo

Yang saya hormat Sekretaris Daerah, Para Asisten, Para staf ahli, Para Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo

Yang saya hormati segenap Anggota FORKOPIMDA atau yang mewakili Rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia

Segala Puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam rapat paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Situbondo terhadap **RANCANGAN AKHIR DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029**. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar dan tetap tegar maju tak gentar dalam perjuangan membela yang benar. Amin. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi teladan seluruh alam dan karenanya paripurna seluruh ibadah dan perjuangan.

Saudara Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia.

Sebelum kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas **RANCANGAN AKHIR DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029**, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Bupati dan Tim Penyusun, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, seluruh elemen masyarakat Kabupaten Situbondo yang telah memberikan masukan dan arahan dalam Musrenbang RPJMD, dan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 ini sehingga dapat dilakukan pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada saat ini.

Saudara Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Hadirin dan Hadirat yang berbahagia.

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh). Dokumen RPJPD ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk setiap periode lima tahun. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) akan menjadi acuan juga bagi Kepala Daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan

Oleh karena itu, perkenankan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan beberapa catatan atas **RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029** sebagai berikut:

1. Terhadap visi dan misi daerah, Kami memandang bahwa visi dan misi yang tertuang dalam dokumen RPJMD sudah cukup mencerminkan semangat perubahan dan kemajuan daerah. Namun demikian, kami mendorong agar rumusan tersebut tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar dijabarkan dalam program yang realistik dan terukur.
2. Kami mencermati bahwa pembiayaan pembangunan masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Untuk itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi potensi daerah, penyederhanaan perizinan, dan digitalisasi pelayanan publik, mengingat kapasitas fiscal daerah semakin rendah akibat tidak berkembangnya PAD dan penurunan transfer pemerintah pusat
3. Terkait Indikator Kinerja Utama
 - a. dalam RPJMD Indikator Kinerja Utama yang wajib untuk dimunculkan dalam dukumen dimaksud yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi?
 - b. Apakah ada acuan khusus sebagai dasar pencantuman Indikator kinerja utama dalam dokumen RPJMD ini?
4. Salah satu unsur penting dalam penyusunan RPJMD adalah integrasi pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran ini merupakan hasil dari kegiatan reses, penyerapan aspirasi masyarakat, serta pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam kurun waktu tertentu. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pokok-pokok pikiran DPRD wajib disampaikan melalui sistem informasi perencanaan pembangunan dan menjadi bagian dari bahan penyusunan dokumen perencanaan, termasuk RPJMD.
Bagaimanakah tata cara atau mekanisme bagi DPRD untuk menggunakan hak dan kewenangan nya dalam mengintergrasikan kebijakan strategis pokok-pokok pikiran DPRD hasil Reses DPRD dalam RPJMD sehingga pokok-pokok pikiran DPRD hasil Reses ini bukan sekadar catatan politik, melainkan bagian dari proses perencanaan yang sah dan harus diperhitungkan secara serius. Dengan demikian, sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam forum Musrenbang ini menjadi sangat penting, agar setiap usulan dan masukan yang berkembang dapat diselaraskan dengan visi, misi, dan program kepala daerah.

5. apakah DPRD bisa menolak persetujuan RPJMD apabila kewajiban pemenuhan belanja mandatori TIDAK DIRENCANAKAN SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN BERLAKU, seperti 20% dari total belanja daerah untuk bidang pendidikan, 10% dari total belanja daerah untuk bidang kesehatan, Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 40% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.
6. Mohon agar ditambahkan Kajian terhadap pengaruh keberadaan jalan tol bagi kabupaten situbondo baik itu dari segi ekonomi maupun infrastruktur daerah, seberapa besar pengaruh jalan tol dan apa saja upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan keberadaan jalan tol di Kabupaten Situbondo.
7. Masih ada beberapa catatan dalam Rekomendasi DPRD terhadap Dokumen Ranwal RPJMD yang masih belum diperbaiki sehingga masih menjadi catatan dalam hasil konsultasi Ranwal RPJMD. Contohnyatanya adalah luasan Kabupaten Situbondo, dan luasan Kecamatan di Kabupaten Situbondo yang tidak sesuai dengan dokumen RTRW Kabupaten Situbondo dan masih 2 kali muncul dalam hasil konsultasi Ranwal RPJMD. Untuk itu kami harap Bapperida untuk lebih serius dan hati-hati dalam menyusun dan mencantumkan data-data dalam dokumen RPJMD ini.
8. Dan yang terakhir, Kami menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan implementasi RPJMD, serta memperkuat peran pengawasan DPRD sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap **RANCANGAN AKHIR DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua. Kurang Lebihnya mohon maaf

*Wallahu'l Muwaffiq Ilaa Aqwamit Thariiq dan
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Situbondo, 22 Mei 2025



----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----**

Terimakasih kepada Saudara Yazid Hasyim Anggota Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Situbondo V yang telah membacakan Pemandangan Umum fraksinya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Demikian tadi telah kita ikuti bersama Penyampaian Pemandangan Umum dari ke 6 Fraksi.

Dan menindaklanjuti usulan dari Ketua Fraksi Golkar Saudara H Rachmad terkait tahapan pembahasan raperda yang dibahas kali ini dan juga berdasarkan hasil koordinasi kami dengan pihak pemerintah daerah bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi meninta jeda waktu satu jam dari hari ini.

Maka untuk itu kami meminta kesepakatan kepada forum rapat untuk Rapat Paripurna Selanjutnya yakni Penyampaian Jawaban Tanggapan Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi dan dilanjutkan kembali pada pukul 13.30 WIB pada hari Kamis Tanggal 22 Mei.

Apakah disetujui . . .

----- **SELURUH ANGGOTA** -----

Setujuuuuuu . . .

----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.)** -----

KETOK 1 KALI

Terima kasih.

Demikianlah Rapat Paripurna yang kedua dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dan telah kita selesaikan dan berlangsung dengan aman tertib dan lancar

Terimakasih atas segala perhatiannya dan kami sampaikan terima kasih dan kami harapkan kepada tim dari pihak pemerintah daerah dalam menyusun jawaban ini untuk kemudian dapat disampaikan kepada kami secara tertulis juga.

=====

PENUTUP

=====

Dan dengan mengucapkan.

“ alhamdulillah hirabbil 'alamin ”

Rapat paripurna ini dinyatakan di tutup

KETOK 3 KALI

WASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABARAKATUH

-----PARIPURNA SESI III-----

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLHI WABAROKATU

Yth. Sdr. Wakil Bupati Situbondo Mbak Ulfiyah

Yth. Segenap Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo.

Yth. Para Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Situbondo.

Yth. Sdr. Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

Yth. Para Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Para Pimpinan Perangkat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Yth. Sdr. Camat se Kabupaten Situbondo, Direktur Rumah Sakit, Pimpinan BUMD, serta rekan-rekan Media yang kami hormati.

Puji syukur kepada Allah Subhanallahu Wata'ala atas segenap limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti Rapat Paripurna yang ketiga ini dalam rangka Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029, dengan agenda PenyampaianTanggapan / Jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum FraksiFraksi.

Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahcurahkan kepada Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Walaihiwasallam nabi akhir jaman yang menjadi rahmat seluruh alam.

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Kami atas nama Pimpinan DPRD tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Saudara-Saudara sekalian, dan kami mohon kepada seluruh peserta rapat untuk menjaga ketertiban sehingga seluruh rapat paripurna ini dapat berlangsung dengan aman tertib dan lancar serta memperoleh hasil sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Maka dengan mengucapkan:

=====: **BISMILLAHIRROHMANIRROHIM** =====

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo pada hari ini Kamis tanggal 22 Mei 2025 dengan agenda Penyampaian Tanggapan Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 KALI

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Sebelum kita memasuki acara pokok, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa susunan acara pada Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Tanggapan/Jawaban Bupati Situbondo atas Pemandangan Umum Fraksi;
3. Penutup.

Marilah kita masuki acara yang kedua yaitu Penyampaian Tanggapan/Jawaban Bupati Situbondo atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.

Kepada yang terhormat Wakil Bupati Situbondo mbak ulfiyah, disilahkan.

=====

**PENYAMPAIAN TANGGAPAN/JAWABAN BUPATI SITUBONDO ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI**

=====

----- **Wakil Bupati Situbondo (ULFIYAH, S.Pd.I)** -----

**TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)**

1. Sesuai Undang-undang Nmr: 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan beserta perubahannya, bahwa jenis dan hirarki peraturan perawan terdiri dari:
 - a. UUD 1945
 - b. TAP MPR
 - c. PERPU
 - d. PP
 - e. PERPRES
 - f. Perda Provinsi
 - g. Perda Kab/Kotainstruksi tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang dapat dicantumkan dalam konsideran mengingat, tetapi dapat dicantumkan dalam uraian dalam rancangan akhir atau naskah akademik. Dasar hukum mengingat berisi :
 - a. dasar kewenangan pembentukan perundang-undangan
 - b. peraturan perawan yg memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Saran diterima dan akan ditambahkan pada Bab 1
3. Saran diterima dan akan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi
4. Adapun langkah-langkah yang telah kami lakukan, antara lain:
 1. Mengirimkan surat edaran kepada pelaku usaha :
 - Untuk membuat dan memfungsikan Instalasi Pembuangan Air limbah (IPAL) sesuai dengan petunjuk dalam Dokumen Lingkungan
 - Menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3)
 - agar melakukan pelaporan kepada DLH Kabupaten Situbondo setiap 6 bulan sekali dengan melampirkan hasil laboratorium terbaru dari Laboratorium yang terakreditasi dan terigistrasi di KLH (Kementerian Lingkungan Hidup)
 - Mengharapkan pelaku usaha yang sudah memperoleh rekomendasi Persetujuan Teknis Air Limbah (Pertek Air Limbah) agar segera mengajukan permohonan SLO (Sertifikat Layak Operasi)
 2. DLH telah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap beberapa pelaku usaha. Selain itu DLH juga melakukan pemantauan lingkungan dengan melakukan uji laboratorium terhadap kualitas air limbah di beberapa titik outlet pembuangan milik pelaku usaha, antara lain di RPH Kec.Situbondo, RS Mitra Sehat, PT Fuyuan, dll
 3. DLH juga melakukan sosialisasi tentang Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup terhadap pelaku usaha tambak dan Rumah sakit, klinik dan puskesmas pada tanggal 10 februari 2025 dengan jumlah peserta 102 orang.

5. Saran diterima dan akan ditindaklanjuti
6. Rata-rata pertumbuhan pajak daerah pada RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 adalah sebesar 2,05%. Besaran tersebut dihitung dengan memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030 yaitu sebesar 2,77%. Laju pertumbuhan pajak daerah tersebut disusun secara optimis realistik dengan mempertimbangkan realisasi capaian target penerimaan di tahun-tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan laju inflasi dan berbagai kebijakan relaksasi pajak daerah dari pemerintah pusat berupa pembebasan seperti pemberlakuan tarif 0% BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR dan tarif 0% BPHTB untuk proyek strategis nasional yang berpengaruh terhadap penghitungan target selama 5 tahun ke depan.
7. Sentralisasi karcis pernah dilaksanakan di Kabupaten Situbondo, namun kegiatan tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan pendistribusian karena dilaksanakan oleh 1 perangkat daerah sehingga membutuhkan proses pengadaan melalui mekanisme lelang. Selain itu juga mengakibatkan ketergantungan kepada 1 perangkat daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana pencetakan. Oleh karena itu, kebijakan diubah menjadi desentralisasi karcis sehingga pencetakan dapat dilaksanakan di masing-masing OPD yang memberikan pelayanan sehingga lebih cepat digunakan sebagai sarana pungut retribusi. Pada Tahun 2023 telah dibentuk Satuan Tugas Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari personil pada beberapa perangkat daerah yang terkait, unsur dari Kejaksaan Negeri Situbondo, serta unsur dari Kepolisian Resort Situbondo. Satgas tersebut bertugas untuk menginventarisir objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, melakukan sinkronisasi database objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait sebagai upaya peningkatan/optimalisasi PAD melalui penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, merumuskan alternatif pemecahan masalah terkait pelaksanaan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, dan melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah. Sehubungan dirasakan pelaksanaan Satgas dimaksud kurang efektif maka di Tahun 2024 dibentuk Tim Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari personil pada beberapa perangkat daerah yang terkait saja tanpa melibatkan unsur dari Kejaksaan Negeri Situbondo, serta unsur dari Kepolisian Resort Situbondo. Tim tersebut memiliki tugas yang sama dengan Satgas sebelumnya.
8. Saran diperhatikan, belanja pegawai merupakan belanja wajib dan merupakan amanat ketentuan perundang-undangan. Belanja pegawai daerah termasuk di dalamnya belanja gaji dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK), belanja gaji dan tunjangan, BPO KDH WKDH, dan belanja gaji dan tunjangan, BPO DPRD. Untuk ke depannya, Pemerintah Kabupaten Situbondo juga wajib menyiapkan alokasi anggaran tambahan PPPK penuh waktu

setelah seleksi tahap 1 dan tahap 2 selesai. Beberapa kemungkinan juga diantisipasi jika ada perubahan status dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

9. Saran diperhatikan, dengan tetap memperhatikan SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Nomor : 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 tanggal 24 Januari 20025 Perihal : Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang telah merumuskan indikator kinerja bidang Pendidikan dengan memperhatikan Standar Pelayanan Minimal.
10. Koperasi yang berkualitas dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran Koperasi yang berkualitas memiliki beberapa aspek yang harus dipenuhi untuk mencapai koperasi berkualitas antara lain kelembagaan yang kuat dengan legalitas jelas, RAT rutin, dan partisipasi anggota aktif, keuangan yang sehat dengan pertumbuhan aset, SHU positif, dan laporan yang diaudit, manajemen profesional dengan SDM kompeten, perencanaan strategis, dan pemanfaatan teknologi. Kegiatan untuk meningkatkan koperasi yang berkualitas berupa pembinaan, pendampingan dan fasilitasi Koperasi yang terdapat di Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, dengan kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
11. Proyeksi IPM Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan hasil capaian IPM Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dimana pertumbuhan kenaikan target IPM tahun 2025 ke target IPM tahun 2030 sebesar 2,8%. Dan apabila disandingkan penetapan target IPM tahunan pada RPJMD Tahun 2025-2029 lebih tinggi dari penetapan target tahunan pada RPJPD Tahun 2025-2045. Untuk dukungan anggaran:

Urusan	2026	2027	2028	2029	2030
Pendidikan	472.309.000.000,00	476.669.000.000,00	476.769.000.000,00	476.869.000.000,00	476.969.000.000,00
Kesehatan	416.665.333.231,19	426.196.379.659,48	428.698.654.493,28	440.664.766.581,76	439.947.485.971,49
Koperasi dan UM	16.696.486.581,00	17.575.235.184,00	18.767.746.079,49	20.405.479.858,22	21.439.327.452,75
Ketenagakerjaan	7.532.000.000,00	8.947.000.000,00	9.335.000.000,00	9.723.000.000,00	11.211.000.000,00
pertanian	241.579.434.841,48	244.318.844.003,26	254.346.435.074,39	271.844.397.164,38	277.939.434.322,96
perikanan	10.650.725.000,00	11.103.497.500,00	11.755.347.250,00	12.718.881.975,00	13.359.770.174,00
Total	1.165.432.979.653,67	1.184.809.956.346,73	1.199.672.182.897,16	1.232.225.525.579,36	1.240.866.017.921,20

Bentuk kegiatan prioritas:

- a. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi
- b. Bantuan biaya bagi siswa miskin terancam putus sekolah
- c. Berantas dan Berantas Plus
- d. Memformulasikan sistem pinjaman modal
- e. Sosialisasi ke Paguyuban dan rekomendasi kriteria pelaku UMKM yang pantas untuk mendapatkan vorsa umkm
- f. Pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
- g. Penyusunan Regulasi tentang Pelatihan Vokasi
- h. Melaksanakan Kerjasama dengan BLK, BLKK dan Lembaga pelatihan swasta untuk pelaksanaan pelatihan kerja
- i. Optimalisasi peran komunitas pelaku usaha untuk membentuk creative hub

- j. Pemasaran destinasi pariwisata dengan menggandeng komunitas dan influencer yg jangkauannya luas
 - k. Pengembangan Kawasan perekonomian dan wisata di Kecamatan Besuki
12. Langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mewujudkan Sekolah Rakyat di Kabupaten Situbondo :
1. Pengajuan proposal kesiapan Sekolah Rakyat beserta kelengkapannya dan telah diverifikasi Kementerian Sosial dan kementerian/lembaga terkait.
 2. Pemerintah Kabupaten Situbondo menyediakan 2 pilihan lokasi berupa Gedung dan lahan milik Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan legalitas yang sah, yaitu :
 - a. Rencana lokasi Sekolah Rakyat berupa Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Komplek GOR Baluran Jalan PB Sudirman No 14 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dengan luas 6977 m², dengan maksud sebagai upaya percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat, sebelum dibangun Sekolah Rakyat yang permanen dilahan Sliwung, dan
 - b. Lahan yang berlokasi di Jalan Bukit Putih Desa Sliwung Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo dengan luas 70519m². Luas lahan tersebut sesuai dengan kriteria lahan yang dipersyaratkan oleh Kementerian Sosial yaitu 5-10 ha.
 3. Hasil verifikasi Kementerian PU (2 x kunjungan) terhadap Gedung GOR selanjutnya direncanakan rehab, dan akan dibuka 3 rombel (1 rombel 25 siswa) untuk kelas Sekolah Menengah Pertama.
 4. Melakukan Rapat Koordinasi dan evaluasi yang dipimpin Sekda bersama linsek terkait (Dinsos, PU, DPKAD Aset, BPS, Dinas Pendidikan, Bapeda, Kemenag, PKH). Membahas perekruitan calon siswa, calon pendidik, tenaga pendidik dan juga pamong.
 5. Membuka pendaftaran calon siswa dan guru/pendidik.
 6. Melakukan verval calon siswa dengan kriteria masuk didata DTSEN
13. Pada dasarnya permasalahan pembangunan dan isu strategis yang ada di RPJMD akan diatasi dengan program yang tercantum pada tabel 4.1 berikut dengan pendanaan per programnya.
14. Penetapan target telah mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya, target dari provinsi, isu strategis serta proyeksi kemampuan pendanaan. Capaian IKU dan IKD dalam RPJMD akan dievaluasi setiap tahunnya, sehingga apabila target yang diproyeksi terlalu tinggi atau melampaui target dapat dirasionalkan melalui Perubahan Perjanjian Kinerja Bupati.
15. Sasaran strategis kepariwisataan pada urusan pariwisata dimana tertuang dalam sasaran perangkat daerah yang meliputi Kontribusi PDRB sektor Pariwisata, indikator persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, rata - rata lama tinggal

wisatawan, dan rata - rata pengeluaran wisatawan. Program yang akan dikembangkan adalah :

- a. pemasaran Pariwisata yang akan melaksanakan expose secara massif dengan IT sebagai metode promosi, sehingga akan lebih efektif dan efisien memberikan impact yang bagus bagi pariwisata di tingkat Internasional
- b. peningkatan kualitas SDM pengelola Pariwisata sebagai jaminan hospitality wisatawan di Situbondo dapat terlaksana dengan kualitas yang baik.
- c. perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur wisata
- d. mengembangkan kerjasama dengan para pelaku wisata

16. Target penurunan TPT dari th 2025 - 2030 adalah sebagai berikut

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,15	3,04	2,93	2,82	2,71	2,59	2,47

Guna mencapai target penurunan TPT tsb di atas beberapa langkah strategis yg sedang dan akan di lakukan oleh Pemda dalam hal ini melalui Disnaker antara lain, mengadakan job fair baik secara online melalui aplikasi AYO BEKERJA dan secara offline setahun 2 kali, mengadakan pelatihan vokasi berbasis kompetensi dan berdasarkan permintaan pasar kerja, pelatihan kewirausahaan, menjalin kerjasama dengan dunia usaha, menyediakan fasilitas gratis bagi perusahaan yg melakukan perekutan. Memberikan kesempatan bagi pengangguran miskin dan disabilitas untuk mengikuti pelatihan kerja dan berwirausaha

17. Adapun strategi untuk mengatasi permasalahan tsb diatas, Pemda akan melaksanakan kegiatan prioritas sebagaimana berikut :

- a. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi
- b. Bantuan biaya bagi siswa miskin terancam putus sekolah
- c. Pemutakhiran data Anak Tidak Sekolah
- d. Optimalisasi program kesetaraan kejar paket A, B, C.
- e. Peningkatan kompetensi SDM Pendidikan, salah satunya dengan memberikan prioritas beasiswa kepada guru PAUD non ASN yang masih lulusan Pendidikan SMA atau belum S1.
- f. Bimtek kapasitas guru dalam melayani siswa disabilitas, sebagai upaya mewujudkan Pendidikan Inklusi
- g. Bimtek pelaksanaan kurikulum
- h. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan, melalui penyediaan data yang valid dan terupdate, dan intervensi infrastruktur Pendidikan yang tepat sasaran.

Dalam penempatan guru, BKPSDM berkoordinasi langsung dengan dinas pendidikan untuk menyampaikan penempatan guru kepada BKPSDM. Selanjutnya BKPSDM mengentry seluruh usulan penempatan guru ke dalam SIASN. Untuk jabatan kepala

- sekolah definitif, sejak 6 bulan sebelum dan 6 bulan setelah pilkada harus melalui izin kementerian dalam negeri.
18. Dari segi regulasi, pemerintah daerah bersama DPRD telah menetapkan Peraturan Daerah yang telah diimplementasikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :
 - a. perda nomor 7/2017 ttg madrasah diniyah takmiliyah
 - b. perbup nomor 75/2018 ttg pertunjuk pelaksanaan perda nomor 7/2017 ttg madrasah diniyah takmiliyah
 19. Untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan upaya pemerataan infrastruktur di 17 wilayah kecamatan, dalam RPJMD dirumuskan strategi pembangunan berupa :
 - a. menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, yang menggali potensi daerah sesuai karakteristik wilayah dan sumber daya yang ada.
 - b. Pemenuhan daya dukung bagi berkembangnya sektor strategis guna mendorong percepatan peningkatan produksi secara berkelanjutan
 - c. Pemenuhan daya dukung kemudahan investasi daerah (Readiness Criteria) berupa regulasi dan sarpras berkualitas di wilayah prioritas
 - d. Dukungan Manajemen dan pemasaran produk unggulan (Channelling) Usaha Mikro dengan pihak strategis agar usahanya dapat berkelanjutan
 - e. Perluasan jangkauan pembinaan wirausaha baru bagi pemuda, kelompok perempuan dan disabilitas
 - f. Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang diimplementasikan secara bertahap
 20. Pemkab Situbondo sudah mempersiapkan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih dgn menyiapkan anggaran pembentukannya pada APBD tahun 2025 dan telah melakukan sosialisasi di 17 kecamatan.

TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

1. Harmonisasi dokumen RPJMD dengan dokumen lainnya telah seperti RPJMN, RPJMD Provinsi, KLHS, dan RTRW telah tercantum pada Bab 1 Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029.
2. Terkait dana cadangan pemerintah daerah,
 - a. Saran diperhatikan, sebagaimana PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pembentukan dana cadangan ditujukan untuk persiapan kebutuhan pemilihan kepala daerah.
 - b. Saran diperhatikan, pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang sekurang-kurangnya berisi tentang penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
3. Peraturan Bupati tentang RIPJPID sedang dalam proses penyusunan dengan substansi yang secara simultan akan dituangkan dalam perbaikan Raperda RPJMD.
4. Berkenaan dengan data jalan dalam kondisi mantap Kabupaten Situbondo tahun 2020 – 2024 perhitungannya menggunakan SK Bupati Situbondo Nomor 188/337/P/004.2/2012 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten Situbondo. Untuk SK Gub Nomor 188/207/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Ruas- Ruas Jalan Menurut Fungsinya akan digunakan dalam menghitung capaian kondisi jalan tahun 2025 sd 2029.
5. Saran diterima dan akan ditindaklanjuti. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota
6. Sesuai Inmendagri Nomor 2 tahun 2025, maka Program Prioritas disusun berdasarkan tujuan dan sasaran. Program administrasi desa mendukung sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor strategis daerah yang didukung peran usaha mikro mandiri dan tujuan Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang Inklusif, Penguatan Usaha Mikro dan Perluasan Lapangan Kerja.
7. Outcame dari Program Pengelolaan tanah kosong adalah Meningkatnya pengelolaan tanah kosong artinya program ini akan mengidentifikasi lahan – lahan kosong yang ada di Kabupaten Situbondo yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang dalam kurun waktu tertentu. Selama kurun waktu 2025 sd 2030 akan dilakukan inventarisasi lahan kosong tiap kecamatan dan setiap tahunnya ditargetkan 1 (satu)

kecamatan. Sehingga perhitungan target persentasenya menggunakan perhitungan sebagai berikut : (Jumlah kecamatan yang dilakukan inventarisasi tanah kosong / Jumlah Kecamatan) X 100%

8. Meskipun tidak dipogramkan sebagai prioritas program perangkat daerah dari tahun 2025-2029, namun Penyusunan RDTR wajib dilakukan penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Permen ATR BPN nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang di Pasal 20 ayat 2 dan 3 disampaikan bahwa :
 - 2) Proses penyusunan RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disinkronkan dengan muatan RTRW kabupaten/kota.
 - 3) Proses penyusunan RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 8 (delapan) bulan

Sehingga sampai saat ini penyusunan RDTR di Kabupaten Situbondo tetap dilaksanakan. Dan telah dituangkan dalam Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan pelaksana Dinas PUPP. Untuk Tahun 2025 penyusunan RDTR dilaksanakan untuk RDTR Perkotaan Suboh, RDTR Perkotaan Panarukan dan RDTR Perkotaan Jangkar. Adapun progres status perkembangan RDTR di Kabupaten Situbondo yang telah disusun adalah sebagai berikut :

Tabel Progres Kelengkapan Administrasi RDTR

No	Nama RDTR	Surat Penetapan Delinasi	Kajian Kebijakan	Ranperkada	Materi Teknis	Peta Rencaan diparaf instansi	Tabel Pemeriksaan Mandiri	BA Kavling Minimum	BA Konsultasi Publik	BA Kabupaten Berbatasan	Rekom Peta Dasar	Validasi KLHS
1	RDTR Perkotaan Panji	Ada	Ada	Ada	Ada	Dibuat mendekati insek	Dibuat mendekati insek	Ada	Ada	Delinasi tidak berbatasan dengan kabupaten Lain	Ada	Ada
2	RDTR Perkotaan Situbondo	Ada	Ada	Ada	Ada	Dibuat mendekati insek	Dibuat mendekati insek	Ada	Ada	Ada	Ada	Proses Permohonan Pra Validasi
3	RDTR Perkotaan Besuki	Ada	Ada	Ada	Ada	Dibuat mendekati insek	Dibuat mendekati insek	Ada	Ada	Delinasi tidak berbatasan dengan kabupaten Lain	Ada	Proses Permohonan Pra Validasi
4	RDTR Perkotaan Asembagus	Ada	Ada	Ada	Ada	Dibuat mendekati insek	Dibuat mendekati insek	Ada	Ada	Delinasi tidak berbatasan dengan kabupaten Lain	Ada	Proses Permohonan Pra Validasi

**TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)**

1. Untuk meningkatkan kualitas SDM pelayanan di MPP, maka langkah strategis yang akan dilaksanakan antara lain :
 - a. Melaksanakan penegakan disiplin dan komitmen OPD :
 - Meninjau Kembali PKS dengan OPD dalam penyediaan petugas yang kompeten dan hadir tepat waktu
 - Memberikan hasil presensi kepada kepala opd masing- masing dan yang akan dilakukan akan mempublish ketidakhadiran petugas
 - b. Pelatihan kepada petugas pelayana, saat melayani berorientasi pada masyarakat
 - c. Memberikan reward dan sanksi kepada petugas layanan
 - d. Meningkatkan kecepatan koneksi jaringan internet dan backup koneksi yg memadai;
 - e. Penanganan tindak lanjut pengaduan sesuai dengan SOP, dan aktif berkomunikasi dengan masyarakat yang melakukan pengaduan.
2. Pencantuman angka target PAD pada dokumen RPJMD Tahun 2026 – Tahun 2030 dihitung dengan memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan pajak daerah tersebut disusun secara optimis realistik dengan mempertimbangkan realisasi capaian target penerimaan di tahun-tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan laju inflasi dan berbagai kebijakan relaksasi pajak daerah dari pemerintah pusat berupa pembebasan seperti pemberlakuan tarif 0% BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR dan tarif 0% BPHTB untuk proyek strategis nasional yang berpengaruh terhadap penghitungan target selama 5 tahun ke depan.
3. Saat ini Dinas pendidikan dalam proses Pemetaan dan Penataan Guru ASN dan Non ASN Bersertifikat Pendidik untuk menjamin pemerataan ketersediaan SDM Guru di setiap sekolah. Untuk Guru yang tidak memenuhi kriteria Paruh Waktu sebanyak 440 orang, saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tengah mencari beberapa alternatif solusi, diantaranya melakukan kajian opsi melalui mekanisme Barjas (Outsourcing), penempatan di sekolah swasta maupun beberapa Opsi lain yang tidak berbenturan dengan regulasi.
4. Target kemiskinan tahun 2030 adalah 9,82%, atau penurunan dari target tahun 2025 ke tahun 2030 sebesar 11,69%.
5. Pemerintah Kabupaten Situbondo (melalui BPBD Kabupaten Situbondo) telah menyusun Kajian Resiko Bencana (KRB) yang memuat Peta Rawan Bencana Tahun 2024-2028 sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan fisik untuk lima tahun ke depan.
6. Langkah – langkah guna menarik investor di Kabupaten Situbondo antara lain :
 - a. Pembuatan Perda Kemudahan Investasi

- b. Pembuatan peta potensi investasi
- c. Promosi investasi
- d. Forum bisnis (investor day)
- e. Penyusunan RUPM
- f. Mengupayakan Tidak ada lagi Pelayanan di masing-masing OPD sehingga masyarakat hanya mendapatkan pelayanan melalui MPP
- g. Akan dilakukan evaluasi secara berkala yang dimimpin oleh Bapak Sekda selaku ketua Tim Investasi Daerah
- h. Melengkapi sarana dan prasarana di MPP sesuai dengan anggaran yang tersedia

**TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)**

Terima kasih atas saran dan masukan yang disampaikan, terutama terkait sarana prasarana dan SDM bidang Pendidikan. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran serta berkolaborasi dengan Perangkat Daerah untuk mencapai Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029.

**TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA (DNS)**

Semua Saran diterima dan akan ditindaklanjuti sebagai bahan penyempurnaan Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029.

TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

1. Visi dan misi RPJMD telah dijabarkan berdasarkan tujuan dan sasaran sampai dengan program prioritas pada Bab 3 sehingga visi dan misi dalam RPJMD dapat direalisasikan dan terukur dalam target capaian.
2. Optimalisasi PAD setiap tahun terus dilakukan untuk meningkatkan realisasi PAD seperti realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 253,324,193,161.60, realisasi Tahun 2023 sebesar Rp 266,007,884,073.73 dan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 271,612,234,160.53 sehingga pencantuman target penerimaan PAD selama 5 tahun dalam dokumen Rancangan RPJMD setiap tahun ditingkatkan yaitu pada tahun 2026 sebesar Rp 315,150,939,335.50 sampai tahun 2030 sebesar Rp 376,657,557,458.63. Penyusunan target berdasarkan data realisasi bulan januari tahun 2025 dan realisasi Tahun 2024. Sedangkan Digitalisasi Pelayanan Publik: Pemerintah daerah telah mengembangkan dan terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, termasuk dalam hal pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah diantaranya e-BPHTB, e-SPPT, Cek Tunggakan PBB-P2. Selanjutnya untuk pendapatan Transfer Pemerintah Daerah di tentukan oleh Pemerintah Pusat.
3. Terkait Indikator Kinerja Utama :
 - a. Sesuai inmendagri nomor 2 tahun 2025, indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan / sasaran yang terseleksi;
 - b. Pencantuman IKU sesuai dengan indikator tujuan dan sasaran yang terdapat di RPJMD.
4. Mekanisme penyampaian Pokir yang sifatnya kebijakan strategis dalam RPJMD dapat disampaikan ketika pelaksanaan Musrenbang RPJMD ataupun rekomendasi raperda, namun yang sifatnya spesifik kegiatan dapat disampaikan pada saat penyusunan RKPD setiap tahunnya sesuai tema dan prioritas Pembangunan
5. Sebagaimana Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya dalam penyusunan arah kebijakan keuangan daerah, analisis mandatory spending masih bersifat umum dan akan diperjelas dalam RKPD dan Raperda APBD setiap tahunnya. Pemenuhan belanja mandatory di atas dilakukan penyesuaian paling akhir tahun 2027. Sebagai informasi, pada APBD TA 2025, belanja daerah untuk bidang Pendidikan mencapai 32,18%, belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi sebesar 32,68%, sedangkan untuk belanja bidang Kesehatan adalah sebesar 26,70%.
6. Secara umum terhadap kajian pengaruh jalan tol dari segi ekonomi maupun infrastruktur bagi Kabupaten Situbondo adalah :

I. Pengaruh Terhadap Ekonomi Daerah

- a. Peningkatan Konektivitas dan Mobilitas. Salah satu pengaruh terbesar dari pembangunan jalan tol adalah peningkatan konektivitas antara Kabupaten Situbondo dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa, terutama Surabaya dan Banyuwangi. Tol Probwangi menghubungkan daerah tersebut dengan Tol Trans-Jawa, yang merupakan jalur utama untuk transportasi barang dan jasa. Waktu tempuh yang lebih singkat, yang sebelumnya dapat memakan waktu lebih dari dua jam, kini bisa dipangkas menjadi hanya sekitar 45 menit. Peningkatan ini tentu akan mengurangi biaya logistik yang selama ini menjadi kendala besar bagi banyak pelaku usaha lokal.
- b. Dampak pada Sektor Perdagangan dan Industri. Tol Probwangi membuka akses yang lebih cepat bagi distribusi barang dari kawasan industri ke pasar-pasar besar. Hal ini tentu memperbaiki daya saing ekonomi lokal karena dapat meminimalkan biaya distribusi dan meningkatkan efisiensi. Dengan semakin terbukanya akses ke pasar regional dan nasional, peluang untuk memasarkan produk lokal dari Situbondo menjadi lebih besar.
- c. Peluang Ekonomi Baru Kehadiran jalan tol juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Fasilitas pendukung seperti rest area, pusat perbelanjaan, dan tempat istirahat bagi para pengendara akan membuka lapangan kerja baru. Selain itu, sektor pariwisata juga akan mendapat manfaat karena kemudahan akses menuju kawasan wisata di Situbondo dan sekitarnya. Penyediaan layanan pariwisata dan kuliner yang berlokasi dekat dengan jalan tol akan menarik wisatawan untuk berhenti dan menikmati fasilitas yang ada

II. Pengaruh Terhadap Infrastruktur Daerah

- a. Peningkatan Kualitas Infrastruktur. Pembangunan jalan tol ini tidak hanya sekadar menambah kapasitas jalan, tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur secara menyeluruh. Dengan adanya jalan tol, pembangunan infrastruktur penunjang seperti drainase, overpass, dan jembatan juga akan ikut meningkat. Proyek ini juga memperbaiki kondisi jalan yang sebelumnya tidak memadai untuk mengakomodasi volume lalu lintas yang tinggi. Selain itu, keberadaan tol meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Pembangunan tol yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung akan menjadikan wilayah Situbondo sebagai kawasan yang lebih modern dan terintegrasi dalam jaringan transportasi nasional
- b. Perbaikan Jaringan Jalan Nasional. Jalan tol yang menghubungkan Situbondo dengan Banyuwangi dan Surabaya merupakan bagian dari Tol Trans-Jawa yang lebih luas, yang menghubungkan ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Ini sangat penting untuk meningkatkan integrasi infrastruktur di seluruh Pulau Jawa. Selain itu, jaringan jalan tol ini juga akan mempercepat aliran

barang dan jasa antar wilayah, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi ekonomi di tingkat nasional. Infrastrukturnya juga mengurangi kemacetan di jalan-jalan utama di luar tol yang selama ini sering menjadi hambatan bagi mobilitas dan distribusi barang

Upaya Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan keberadaan jalan tol adalah :

- a. Pengembangan Fasilitas Pendukung di Sekitar Tol. Pengembangkan berbagai fasilitas pendukung yang dapat meningkatkan perekonomian daerah dengan memberi kemudahan perijinan terhadap investor untuk pembangunan di Kawasan exit tol seperti rest area, pusat perbelanjaan, hotel, dan restoran yang dapat menjadi tempat berhenti bagi para pengendara. Fasilitas ini tidak hanya mendukung kenyamanan perjalanan, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk meningkatkan omset mereka.
- b. Perbaikan Infrastruktur Jalan Lokal. Agar distribusi barang dan mobilitas masyarakat di dalam Kabupaten Situbondo tetap lancar, perlu dilakukan perbaikan jalan-jalan lokal yang menghubungkan kawasan tol dengan pusat ekonomi dan pemukiman. Ini meliputi perbaikan kondisi jalan, peningkatan sistem drainase, dan pembangunan infrastruktur penunjang lainnya.
- c. Konektivitas Antar Kawasan. Memaksimalkan konektivitas antar Kawasan dengan memastikan bahwa jalan tol tidak hanya mempercepat akses antar wilayah besar, tetapi juga mempercepat konektivitas antar desa dan kawasan produksi di Situbondo. Hal ini dilakukan dengan memaksimalkan fungsi jaringan jalan pendukung yang menghubungkan area produksi, seperti sektor pertanian dan perikanan, dengan tol. Hal ini akan mengurangi waktu dan biaya distribusi barang, serta meningkatkan daya saing produk lokal.
- d. Fasilitasi Pengembangan UMKM. Pendampingan bagi pelaku UMKM yang terdampak oleh pembangunan jalan tol, terutama yang berlokasi di sepanjang jalur Pantura. Pengembangan strategi pemasaran online, serta penyediaan tempat usaha baru di area rest area dan fasilitas pendukung tol, dapat membantu UMKM agar tetap eksis dan berkembang meskipun ada perubahan dalam pola arus lalu lintas.
- e. Pengembangan Sektor Pariwisata. Mempromosikan objek wisata di kawasan pesisir atau gunung yang sebelumnya sulit diakses. Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata seperti penginapan dan restoran di sepanjang jalan tol dapat meningkatkan sektor pariwisata.
- f. Pengembangan Kawasan Industri. Menarik investor untuk membangun kawasan industri di sekitar jalan tol. Dengan memberikan kemudahan bagi investor yang berminat membuka industri di Situbondo, terutama yang dapat memanfaatkan kemudahan akses transportasi yang diberikan oleh jalan tol. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian daerah.

Secara kebijakan / peraturan upaya - upaya tersebut diatas telah didasari dan didukung melalui peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2025 – 2045. Adapun secara substansi berkaitan dengan kebijakan jalan tol di Kabupaten Situbondo menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang RTRW Kabupaten Situbondo Tahun 2025 – 2045 adalah sebagai berikut :

- Pasal Pasal 92 Perwujudan kawasan strategis kabupaten akan diwujudkan melalui pengembangan akses ke arah jalan arteri primer dan jalan tol
- Pasal 106 Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jalan tol

Ketentuan umum zonasi terdapat di sekitar jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi semua kegiatan pengembangan, operasi, dan penunjang jalan tol;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan dan pemanfaatan sarana dan infrastruktur wilayah dan kota lainnya;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu operasi dan keselamatan jalan tol;
- d. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - papan pengenal, patok batas, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
 - jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
 - ketentuan lainnya meliputi setiap pemanfaatan ruang disekitar jalan tol mengikuti ketentuan perundang-undangan.

7. Luasan Kabupaten Situbondo yang tercantum dalam Raperda RPJMD telah disesuaikan berdasarkan Perda nomor 3 Tahun 2025 Tentang RTRW Kabupaten Situbondo tahun 2025-2045 pada halaman II-2 yakni 165.505 ha atau 1.655,05 km2.
8. Implementasi RPJMD dalam program-program prioritas yang dilaksanakan dalam periode 5 tahun selalu melibatkan Masyarakat baik sejak dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan serta melibatkan pihak legislative.

WAKIL BUPATI SITUBONDO

ULFIYAH, S.Pd.

----- **PIMPINAN RAPAT (MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.) -----**

Terimakasih kepada Wakil Bupati Mbak Ulfie atas penjelasan penyampaian jawaban atau tanggapan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Demikianlah Rapat Paripurna hari ini dapat diselesaikan dan berlangsung dengan aman tertib dan lancar setelah rangkaian rapat paripurna pada hari ini tahapan berikutnya tentunya adalah pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Dan kita di DPRD membentuk pembahasannya yakni Panitia Khusus Pembahasan Perda RPJMD Kabupaten Situbondo

Rapat Dewan dan Hadirin yang Kami hormati,

Terimakasih atas segala perhatian dan kehadirannya, tak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam Rapat Paripurna ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati.

=====

PENUTUP

=====

Dan dengan mengucapkan.

“ alhamdulillah hirabbil 'alamin ”

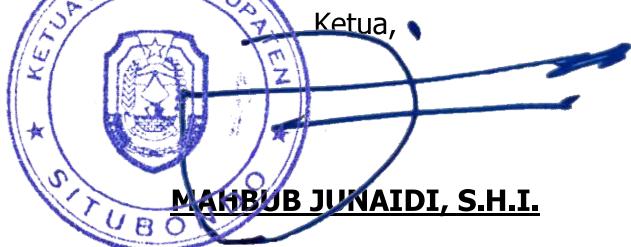
Rapat paripurna hari ini kami dinyatakan di tutup.

KETOK 3 KALI

WASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABARAKATUH

Situbondo, 22 Mei 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**



MAHBUB JUNAIDI, S.H.I.

Ketua,

BERKAS PENDUKUNG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-e-mail dprdkab@situbondokab.go.id

Situbondo, 21 Mei 2025

Nomor : 100.1.6.1/373/431.100./2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (lembar)
Perihal : Undangan

Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Situbondo

di SITUBONDO

Memperhatikan Surat Badan Musyawarah Nomor :100.1.6.1/310/431.100/2025 tanggal 02 Mei 2025 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Situbondo Bulan Mei 2025, akan dilaksanakan Rapat Paripurna Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I) tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 – 2029.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada Rapat Paripurna dimaksud sebagaimana Jadwal terlampir.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Sdr. Sekretaris DPRD
Kab. Situbondo (untuk difasilitasi)

Catatan : Pakaian;
Anggota : PSH





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman: //dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

JADWAL RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM RANGKA

Rapat Paripurna Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I) tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 – 2029.

NO	HARI/TGL/ PUKUL	SUSUNAN ACARA	TEMPAT / KET
1	Kamis/22 Mei 2025 Pukul 09.00 WIB	Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I) tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 – 2029. Susunan Acara I : 1. Pembukaan; 2. Pembacaan Surat Masuk; 3. Penyampaian Nota Pengantar Oleh Kepala Daerah; 4. Penutup.	Ruang Rapat Pleno Lt II
2	Kamis/22 Mei 2025 Pukul 10.00 WIB	Susunan Acara II : 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Pemandangan umum Fraksi; 3. Penutup	Ruang Rapat Pleno Lt II
3	Kamis/22 Mei 2025 Pukul 11.00 WIB	Susunan Acara III : 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Tanggapan / Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi; 3. Penutup.	Ruang Rapat Pleno Lt II



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

Situbondo, 21 Mei 2025

Nomor : 100.1.6.1/374/431.100./2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (lembar)
Perihal : Undangan

Yth
1. Sdr. Bupati Situbondo;
2. Sdr. Wakil Bupati Situbondo ;
3. Sdr. Komandan Kodim 0823 Situbondo ;
4. Sdr. Kapolres Situbondo;
5. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo;
6. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Situbondo.

di_

SITUBONDO

Memperhatikan Surat Badan Musyawarah Nomor :100.1.6.1/310/431.100/2025 tanggal 02 Mei 2025 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Situbondo Bulan Mei 2025, akan dilaksanakan Rapat Paripurna Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I) tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 – 2029.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada Rapat Paripurna dimaksud sebagaimana Jadwal terlampir.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Sdr. Sekretaris DPRD
Kab. Situbondo (untuk difasilitasi)

Catatan : Pakaian;
Forkopimda : Yang Berlaku Pada Hari Itu





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman: dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

JADWAL RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM RANGKA

Rapat Paripurna Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I) tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 – 2029.

NO	HARI/TGL/ PUKUL	SUSUNAN ACARA	TEMPAT / KET
1	Kamis/22 Mei 2025 Pukul 10.00 WIB	Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I) tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 – 2029. Susunan Acara I : 1. Pembukaan; 2. Pembacaan Surat Masuk; 3. Penyampaian Nota Pengantar Oleh Kepala Daerah; 4. Penutup.	Ruang Rapat Pleno Lt II
2	Kamis/22 Mei 2025 Pukul 10.00 WIB	Susunan Acara II : 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Pemandangan umum Fraksi; 3. Penutup	Ruang Rapat Pleno Lt II
3	Kamis/22 Mei 2025 Pukul 11.00 WIB	Susunan Acara III : 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Tanggapan / Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi; 3. Penutup.	Ruang Rapat Pleno Lt II



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

Situbondo, 21 Mei 2025

Nomor : 100.1.6.1/375/431.100./2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (lembar)
Perihal : Undangan

Yth 1. Sdr. Sekretaris Daerah;
2. Sdr. Staf Ahli;
3. Sdr. Asisten;
4. Sdr. Inspektur;
5. Sdr. Kepala OPD/Kepala Badan/Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah
6. Sdr. Direktur RSUD/ BUMD
7. Sdr. Camat se Kabupaten Situbondo

di_

S I T U B O N D O

Memperhatikan Surat Badan Musyawarah Nomor :100.1.6.1/310/431.100/2025 tanggal 02 Mei 2025 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Situbondo Bulan Mei 2025, akan dilaksanakan Rapat Paripurna Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I) tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 – 2029.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada Rapat Paripurna dimaksud sebagai jadwal terlampir.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Sdr. Sekretaris DPRD
Kab. Situbondo (untuk difasilitasi)

Catatan : Pakaiian;
OPD : Batik





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman: //dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

JADWAL RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM RANGKA

Rapat Paripurna Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I) tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 – 2029.

NO	HARI/TGL/ PUKUL	SUSUNAN ACARA	TEMPAT / KET
1	Kamis/22 Mei 2025 Pukul 09.30 WIB	Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I) tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025 – 2029. Susunan Acara I : 1. Pembukaan; 2. Pembacaan Surat Masuk; 3. Penyampaian Nota Pengantar Oleh Kepala Daerah; 4. Penutup.	Ruang Rapat Pleno Lt II
2	Kamis/22 Mei 2025 Pukul 10.00 WIB	Susunan Acara II : 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Pemandangan umum Fraksi; 3. Penutup	Ruang Rapat Pleno Lt II
3	Kamis/22 Mei 2025 Pukul 11.00 WIB	Susunan Acara III : 1. Pembukaan; 2. Penyampaian Tanggapan / Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi; 3. Penutup.	Ruang Rapat Pleno Lt II

DAFTAR HADIR



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman: dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa

HARI / TANGGAL

: Kamis, 22 Mei 2025

JAM

: 09.00 WIB s/d selesai

TEMPAT

: Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo

ACARA

1. Rapat Paripurna Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I)
Tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN	L/P
1	MAHBUB JUNAIDI, SH.I	KETUA DPRD	1	L
2	EDY WAHYUDI,SE	ANGGOTA DPRD	2	L
3	ZULFIKAR PURNAMA RAHMAN,S.T	ANGGOTA DPRD	3	L
4	FADLAILUL WAFIR.,S.Pd	ANGGOTA DPRD	4	L
5.	FIQI KRISTIA VINALOSA.,Amd,Keb	ANGGOTA DPRD	5	P
6	JOHANTONO.,S.Pd	ANGGOTA DPRD	6	L
7	SITI MARIA ULFA.,SH	ANGGOTA DPRD	7	P
8	M. ASYHERI NUR., S. Sy	ANGGOTA DPRD	8	L
9	SUPRAPTO	ANGGOTA DPRD	9	L
10	YAZID HASYIM	ANGGOTA DPRD	10	L
11	MOKHAMMAD BADRI., ST	ANGGOTA DPRD	11	L
12	MUZAMMIL DAMAN HURI.,SH	ANGGOTA DPRD	12	L
13	AHMAD JUNAIDI, SE	ANGGOTA DPRD	13	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman: //dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI Partai Persatuan Pembangunan

HARI/ TANGGAL : Kamis, 22 Mei 2025
JAM : 09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA : Rapat Paripurna Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I)
Tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN	L/P
1	H. ABD. RAHMAN, SH., MH	WAKIL KETUA DPRD	1	L
2	Dr. Drs. H. SOFWAN HADI, M.Si	ANGGOTA DPRD	2	L
3	A R I F I N, SHI., MM	ANGGOTA DPRD	3	L
4	H. FAISOL/ABD. SYAKUR JALIL	ANGGOTA DPRD	4	L
5.	NURIL HASHINA.,SH	ANGGOTA DPRD	5	P
6	Dra. Hj. UMI MASLAHAH	ANGGOTA DPRD	6	P
7	IRMA NOERVADILA, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA DPRD	7	P
8	M. FAISOL., S.Pd.I., M.Pd.I	ANGGOTA DPRD	8	L
9	MUHAMMAD HASAN ILLYIN, S.Psi	ANGGOTA DPRD	9	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman: //dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI GERAKAN INDONESIA MAJU (GIM)

HARI / TANGGAL : Kamis, 22 Mei 2025
JAM : 09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA : 1. Rapat Paripurna Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I)
Tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN	L/P
1	Dr.H.HAMBALI.,M.Pd	WAKIL KETUA DPRD	1	L
2	ANDRIAN OKTADIANSYAH.,SE	ANGGOTA DPRD	2	L
3	DJAENUR RIDOH	ANGGOTA DPRD	3	L
4	AFIF REZA RIMUNDA.,SH	ANGGOTA DPRD	4	L
5	ZAIDANI	ANGGOTA DPRD	5	L
6	SAMSI IKA SARI.,S.Pd	ANGGOTA DPRD	6	L
7	HARI BUDI PRASETYA	ANGGOTA DPRD	7	P
8	ROZAN FATIH FH	ANGGOTA DPRD	8	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman: //dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI PDI-Perjuangan

HARI/ TANGGAL : Kamis, 22 Mei 2025
JAM : 09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA : Rapat Paripurna Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat 1)
Tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN	L/P
1	ANDI HANDOKO	WAKIL KETUA DPRD	1	L
2	NINGSIH MS, S.Pd.I,M.Pd	ANGGOTA DPRD	2	P
3	RUDI AFIANTO, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA DPRD	3	L
4	RISKIYAH NURFADILAH.,S.Sos	ANGGOTA DPRD	4	P
5	SUPOYO.,SH	ANGGOTA DPRD	5	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

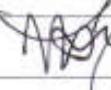
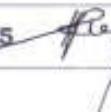
Telepon (0338) 675613

Laman ://dprd.situbondokab.go.id. Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI GOLKAR

HARI/ TANGGAL : Kamis, 22 Mei 2025
JAM : 09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA : 1. Rapat Paripurna Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I)
Tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029

NO	N A M A	J A B A T A N	T A N D A - T A N G A N	L/P
1	H. RACHMAD.,SH.,M.Hum	ANGGOTA DPRD	1 	L
2	HEROE SOEGIHARTONO, SH	ANGGOTA DPRD	2 	L
3	Drs. H. SYAIFULLAH.,MM	ANGGOTA DPRD	3 	L
4	SISWO PRANOTO, SH	ANGGOTA DPRD	4 	L
5.	TUMYANI	ANGGOTA DPRD	5 	P

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telpon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

FRAKSI DEMOKRAT NURANI SEJAHTERA

HARI/ TANGGAL : Kamis, 22 Mei 2025
JAM : 09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA : 1. Rapat Paripurna Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I)
Tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN	TANDA-TANGAN	L/P
1	JANUR SASRA ANANDA, SE	ANGGOTA DPRD	1	L
2	YOGI PRATAMA.,S.Sos	ANGGOTA DPRD	2	L
3	TOTON BENI MARTONO.,S.Kep	ANGGOTA DPRD	3	L
4	H. AHMAD ZUHRI NOER WAHYUDI	ANGGOTA DPRD	4	L
5	AHMAD MUHLISIN,S.P.,M.M	ANGGOTA DPRD	5	L

KET :

Hadir : Orang

Ijin : Orang

Sakit : Orang



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman: //dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

TANDA TERIMA MAMIN KOMISI-KOMISI

HARI/ TANGGAL : Kamis, 22 Mei 2025
JAM : 09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA : 1. Rapat Paripurna Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I)
Tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029

NO	KOMISI	BANYAKNYA	TANDA-TANGAN
1	KOMISI I		
	ANGGOTA 10 ORANG		
	PENDAMPING 1	12 NASI KOTAK	1
	ASISTEN 1		
2	KOMISI II		
	ANGGOTA 10 ORANG		
	PENDAMPING 1	12 NASI KOTAK	2
	ASISTEN 1		
3	KOMISI III		
	ANGGOTA 10 ORANG		
	PENDAMPING 1	12 NASI KOTAK	3
	ASISTEN 1		
4	KOMISI IV		
	ANGGOTA 11 ORANG		
	PENDAMPING 1	13 NASI KOTAK	4.
	ASISTEN 1		
5	PIMPINAN		
	PIMPINAN 4	5 NASI KOTAK	5.
	AJUDAN 1		
6	SATPOL PP		
	RESEPSIONIS 2	6 NASI KOTAK	6.
	PENJAGAAN 4		



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga Nomor 1, Patokan, Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 675613

Laman://dprd.situbondokab.go.id, Pos-el dprdkab@situbondokab.go.id

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Kamis, 22 Mei 2025
JAM : 09.00 WIB s/d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna Lt. 2 DPRD Kab. Situbondo
ACARA : 1. Rapat Paripurna Pembahasan dan Persetujuan (Pembicaraan Tingkat I)
Tentang Raperda RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO,S.Sos	BUPATI	1.	
2.	ULFIYAH,S.Pd.I	WAKIL BUPATI		
3.		SEKRETARIS DAERAH	3.	
4.	Farid Afif	KOMANDAN KODIM 0823	4.	
5.	March Hartary	KAPOLRES SITUBONDO	5.	
6.	Sigit 6.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO	6.	
7.		KETUA PENGADILAN NEGERI	7.	
ASISTEN				
8.	Drs.PRIO ANDOKO,M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	8.	
9.	Drs.H. AKHMAD YULIANTO,M.Si	PIT.ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	9.	
10.	DWI HERMAWAN SUSILO.,SKM.,M.Kes	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	10.	
STAF AHLI				
11.	Drs. ABD RASYID (Pensiun)	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	11.	
12.	H. SUGENG YUWONO.,SH.,M.Si	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	12.	
13.	Dr. H. FATHORRAHMAN.,M.,Pd	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM	13.	
BAGIAN SEKRETARIAT				
14.	ABDUL KADIR JAELANI.,S.Sos.,M.Si	KABAG TATA PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA	14.	

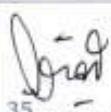
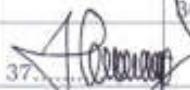
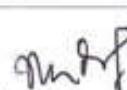
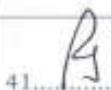
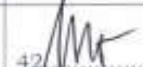
15.	BHIMA SUNARTO PUTRA,SH	Plt.KABAG HUKUM	15.....	
16.	SIGIT SUSETYO RAHARJO.,SSTP.,M.Si	KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		16.....
17.	IWAN SUBHAKTI,S.T	Plt.KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	17.....	
18.	Drs. H. IMAM SUHAIDI.,M.Si	KABAG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SDA		18.....
19.	KHATIB AL BAROZI.,SE	KABAG PENGADAAN BARANG DAN JASA	19.....	
20.	AGUNG WINTORO.,S.Sos.,M.Si	KABAG ORGANISASI		20.....
21.	Dr.RATNA KOBA SUSANTI.,S.Sos.,M.Si	KABAG UMUM	21.....	
22.	IMAS SUSILO WICAKSONO,S.AP.,MM	KABAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN		22.....

INSPEKTORAT DAN BADAN

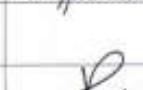
23	Ir. PUGUH SETIJARTO	INSPEKTUR	23.....	
24.	Drs. SUGIYONO.,M.Pd.I	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		24.....
25	Drs. HARYADI TEJOLAKSONO.,M.Si	BADAN PENDAPATAN DAERAH	25.....	
26	Ir. SENTOT SUGIONO.,M.Si	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		26.....
27	SAMSURI,S.Sos.,MM	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	27.....	
28	BUCHARI,S.E.T	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		28.....
29	SRUWI HARTANTO.,S.Pd.,MM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	29.....	

DINAS

30	Dr. H. FATHORRAHMAN.,M.,Pd	Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		30.....
31	Dr. SANDY HENDRAYONO.,M.KES	KEPALA DINAS KESEHATAN	31.....	
32	ABDUL KADIR JAEANI.S.Sos.,M.Si	Plt.KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN PERMUKIMAN		32.....
33	Ir. TIMBUL SURJANTO.,MM	KEPALA DINAS SOSIAL	33.....	
34	KHOLIL.,SP.,MP	KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN		34.....

35	H. MUHAMMAD IMAM DARMAJI.,M.Si	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNG AN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	35..... 
36	DADANG ARIES BINTORO.,S.Sos.,M.Si	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	36..... 
37	Drs. AHMAD YULIANTO.,M.Si	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	37..... 
38	Dra. Hj. TRI CAHYA SETIANINGSIH.,MM	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SİPIL	38..... 
39	SURIYATNO.,SH	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	39..... 
40	Ir. RIKWAN SUGIHARTO.,MM	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	40..... 
41	ANNA KUSUMA.,SH.,M.Si	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	41..... 
42	EDY WIYONO.,S.Sos.,M.Si	KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	42..... 
43	Ir. QURRATUL AINI.,M.Si	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	43..... 
44	H. PUGUH WARDYO.,S.Sos.,MM	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	44..... 
45	DWI HERMAWAN SUSILO.,SKM.,M.Kes	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	45..... 
46	Drs. AHMAD DJUNAIDI.,M.Si	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	46..... 
47	SOPAN EFENDI,SSTP.,M.Si	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	47..... 

BUMD

48	dr. ROEKMY P.ARIO.,M.KES	DIREKTUR RSUD ABDOER RAHEM SITUBONDO	48..... 
49	dr. IMAM HARIYONO	DIREKTUR RSUD BESUKI	49..... 
50	Dr. SUDARMONO	DIREKTUR RSUD ASEMBAGUS	50..... 
51	ASY'ARI.,S.Sos.,MM	DIREKTUR PDAM	51..... 
52	ARIFIN HIDAYAT	DIREKTUR BANK SYARIAH	52..... 

KECAMATAN

53		CAMAT BANYUPUTIH	53.....	
54	RAHMAT FAUZI	CAMAT ASEMBAGUS	54..... 	
55		CAMAT JANGKAR	55.....	

56		CAMAT ARJASA		56.....
57	NURUL HUDA, SE	CAMAT KAPONGAN	<i>Ab</i>	57.....
58	Abdul Pardir, SH	CAMAT MANGARAN		<i>fm</i> 58.....
59	ARI YUDHIS	CAMAT PANJI	<i>W</i>	59.....
60	Haris Wattayubi	CAMAT SITUBONDO		<i>Y</i> 60.....
61	OKti Soeprihatin, S.Sos	CAMAT PANARUKAN	<i>OKti</i>	61.....
62	Faishol A.	CAMAT KENDIT		<i>fa</i> 62.....
65	OKti Soeprihatin Yogyo - K.S	CAMAT BUNGATAN	<i>fm</i>	65.....
66	Agusti Aisyah Cengkareng	CAMAT MLANDINGAN		<i>fm</i> 66.....
67	Slamet Muryanti	CAMAT SUBOH	<i>fm</i>	67.....
68	Taufan A. Jaksana	CAMAT BESUKI		<i>fm</i> 68.....
69	Sumagio	CAMAT JATIBANTENG	<i>fm</i>	69.....
70	Parlis. Hanany	CAMAT SUMBERMALANG		<i>fm</i> 70.....
71	SCIBIRYO	CAMAT BANYUGLUGUR	<i>fm</i>	71.....

UMUM

72	Fathur Rahman		<i>fm</i>	72.....
73	Hanum		<i>fm</i>	73.....
74	Feri		<i>fm</i>	74.....
75	Jendri		<i>fm</i>	75.....
76	Fadi W.		<i>fm</i>	76.....
77	Batrus S.		<i>fm</i>	77.....
78	Gatra		<i>fm</i>	78.....
79	Balok Budiarto		<i>fm</i>	79.....
80	Parli Hariana		<i>fm</i>	80.....
81	Pariz Angsan		<i>fm</i>	81.....
82	Santien		<i>fm</i>	82.....
83	Dzaz Eniay		<i>fm</i>	83.....
84	Emilasari Suci S.		<i>fm</i>	84.....

85				85
86			86	
87				87
88			88	
89				89
90			90	
91				91
92			92	
93				93
94			94	
95				95
96			96	
97				97
98			98	
99				99
100			100	
101				101
102			102	
103				103
104			104	
105				105
106			106	
107				107
108			108	
109				109
110			110	
111				111
112			112	
113				113

114	Acastri S	Wan.	114	A
115	Scha	W.	115	A
116	Arap.	W.	116	A
117	Fandi	W.	117	A
118	Utr		118	/
119	Juhairiyah	FPKB	119	fe
120	FIFI DSB	PROTOKOL	120	A
121	Ernia R	Protokol	121	A
122	FATHI		122	A
123	Reza		123	A
124	Ani	Disnaker	124	Atif
125	Dionis D	Bappede	125	W
126	Hadiqah	—	125	W
126	YUSFAN YR	—	126	gy
127	Cipti Nur A	Pembor	127	A
128	Leo	Pembor	128	A
129	Mavia B		129	W
130	YATNO. W	OPERATOR	130	75
131	Julita Sasm	TA	131	W
132	Rifasetro Y	staf	132	W
133	Hadratu Rakhma	staf BAPPERTIN	133	A
134	Heri Yulianto	Men	134	A
135	Altino	—	135	A
136	Syabli Duli	Han Dnye	136	A
137	Ferdi A.	Sop Disparpore	137	W
138	Rofiqi	TAP G/M	138	A
139	Nur Amandini	Hukum	139	W

140	Yoga Pramana		140	Yoga
141	TUKTO KW.		141	X
142	DEVY SUMANTI	Kab. Humas		142
143	SUKISWANTO	Humas	143	✓
144	FIKA AYU	"	144	✓
145	SHERLY	"	145	✓
146	Rosy Rosaindratna	Bappende.	146	✓
147	M. Agus Maulidz.	Bap. - ketu	147	✓
148	Zulhamei	Bappende	148	✓
149	Shanti Y.	Set.	149	✓
150	Karza I.	pol PP.	150	✓
151	Yanto	—	151	✓
152	Didi F.	—	152	✓
153	Sugars	INDO	153	✓
154	Adiul Supriyadi	Kabag Keuangan	154	✓
155	Balgis Farliza	Staf Setwan	155	✓
156	MARTIRA F.	P2U	156	
157	FIRDA YUNITA D.	"	157	
158	NANDA P	"	158	
159	FITRI FARLIANA ,SM	PERSIDANGAN	159	
160	AISYAH	"	160	✓
161	SAMSUL HADI	"	161	✓
162	BUDIANTO	"	162	✓
163			163	
164			164	
165			165	

FOTO KEGIATAN





































